



**PERAN DAN STRATEGI TOKOH AGAMA  
DALAM MENANGKAL GERAKAN SEPARATIS PAPUA**

**TESIS**

**Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Pertahanan  
Universitas Pertahanan Indonesia**

**Oleh**

**BENEDICTUS WIDJANARKO**

**Nomor Pokok Mahasiswa: 120090101027**

**Program Studi Strategi Perang Semesta  
Sekolah Strategi Perang Semesta  
Universitas Pertahanan Indonesia**

**UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA**

**2010**

**PERLU DIPERHATIKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:**

1. Lambang UNHAN (ini yang benar, karena warna merah bendera ada disebelah kiri atas, **Ukuran lambang tersebut jangan dirubah**)
2. Jenis huruf (Arial)
3. Ukuran Huruf (14 utk Judul Utama, 12 utk judul dalam kurung, 14 utk tulisan TESIS, 12 utk ukuran tulisan lainnya seperti contoh tsb dan 14 utk tulisan UNINVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA, 14 utk Tahun kelulusan 2010)
4. Huruf Besar dan huruf kecil
5. Desain
6. Nomor Mahasiswa (120090101**000**, angka 1 pertama merupakan Kode Mahasiswa Reguler/Full Time, angka 2009 merupakan tahun masuk mahasiswa, 01 pertama merupakan kode SSPS, angka 01 kedua merupakan kode Program Studi, dan angka **000** merupakan nomor mahasiswa), **Nomor mahasiswa jangan sampai salah**, tulis seperti ini urutannya
7. Semua huruf pada halaman sampul tersebut di **BOLD (ditebalkan)**.

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERAN DAN STRATEGI TOKOH AGAMA  
DALAM MENANGKAL GERAKAN SEPARATIS PAPUA**

Oleh :

**BENEDICTUS WIDJANARKO**

**Nomor Pokok Mahasiswa: 120090101027**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Pertahanan pada program studi Strategi Perang Semesta Universitas Pertahanan Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta, Agustus 2010

**DISAHKAN OLEH :**

1. Dr. Bantarto Bandoro , : Pembimbing I
2. Rodon Pedrason, M.A , : Pembimbing II
3. Prof. Dr. Sri Hartati R.S , : Penguji I
3. Dr. G. Ambar Wulan , : Penguji II
4. Bonggas Adi Chandra, MSI , : Penguji III

Mengetahui  
Komandan Sekolah Strategi Perang Semesta

Sonny ES Prasetyo, MA  
Brigadir Jenderal TNI

## ABSTRAK

Nama : Benedictus Widjanarko  
Program studi : Sekolah Strategi Perang Semesta  
Judul : Peran dan Strategi Tokoh Agama Dalam Menangkal  
Gerakan Separatis Papua.

Penelitian berfokus pada upaya penyelesaian konflik antara Pemerintah Indonesia dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang sampai saat ini masih belum menemukan bentuk solusi. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian secara ilmiah, khususnya terkait dengan Peran dan Strategi Tokoh Agama dalam membantu Pemerintah Indonesia menangkali gerakan separatis di Papua.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa eksistensi separatis Papua dipengaruhi oleh beberapa aspek dan dimensi. Karena itu tokoh agama memiliki peran strategis sebagai agen perubahan (*agent of change*), yang mampu menuntun dan memotivasi segenap warga masyarakat tetap NKRI. Disarankan perlu secara optimal Pemerintah memberi ruang kepada para tokoh agama untuk ikut andil dalam mensiasati permasalahan separatis di Papua.

Kata kunci :

Separatis, konflik, tokoh, dialog, kepemimpinan.

## **ABSTRACT**

Name : Benedictus Widjanarko  
Study Program: School of Total War Strategy  
Title : The Role and Strategy of Religious Leaders in  
Deterring the Papua Separatist Movement

This study focuses on the efforts of religious leaders in Papua to help resolve the conflict between the Papua Separatist Movement and the Government of Indonesia. The study found that the role of the religious leaders are very instrumental in helping the government to solve its conflict with the Papua Separatist Movement. The engagement of religious leaders in solving the conflict reflects the fact that the Government needs the hand of others in solving the conflict.

The study concluded that the Government in fact needs the involvement of other elements of the society in counterring as well as solving the conflict between the Government and the Papua Separatist Movement. The strategy employed by the religious leaders also resulted in a change of the position of the Papuan Separatist Movement toward the Government.

Keywords:

Separatism, conflicts, people, dialogue, leadership.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai civitas akademik Universitas Pertahanan Indonesia, saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Benedictus Widjanarko  
NPM : 120090101027  
Program Studi : Sekolah Strategi Perang Semesta  
Departemen : Pertahanan  
Fakultas : Strategi Perang Semesta  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Indonesia **Hak Bebas Royalty Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Peran dan Strategi Tokoh Agama Dalam Menangkal Gerakan Separatis Papua**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Noneksklusif ini Universitas Pertahanan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemiliki Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : Agustus 2010

Yang menyatakan

Benedictus Widjanarko

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Benedictus Widjanarko

NPM : 120090101027

Tanda Tangan :

Tanggal : Agustus 2010

## DAFTAR GAMBAR

Gambar : 4.1.2 Persentase Responden tentang kegagalan Otsus Mencapai Sasaran Meningkatkan Sosial Ekonomi Penduduk Papua

Gambar : 4.2.1 Persentase pendapat responden terhadap pencegahan gerakan separatis Papua melalui pendekatan Dialogis

Gambar : 4.2.3 Pengaruh Tokoh Agama Mampu Mendekati Kelompok Separatis Papua (OPM)

Gambar : 4.2.2.2 A Skema usaha preventif Kowil TNI & Tokoh Agama terhadap keberadaan OPM

## DAFTAR TABEL

Tabel : 4.1.3 A Persentase frekwensi Aktivitas Kelompok Separatis Papua (KSP/P) Tahun 2007-2008

Tabel : 4.1.3 B Frekwensi Aktivitas Kelompok Separatis Papua (KSP/B) Tahun 2007-2008

Tabel : 4.2.2 Persentase responden terhadap pendekatan keamanan dalam Mengatasi Kelompok Separatis Papua (OPM)

Tabel : 4.2.2.2 B Faktor Kekuatan dan Kelemahan dan Upaya Preventif Gerakan OPM

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya, penulis telah dapat menyelesaikan tugas dalam menyusun tesis dengan judul “ Peran dan Strategi Tokoh Agama dalam Menangkal Gerakan Separatis Papua.

Penyusunan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Pertahanan pada Sekolah Strategi Perang Semesta Universitas Pertahanan Indonesia. Penulis menyadari bahwa penyusunan Tesis ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu melalui kesempatan ini ijin saya menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Mayjen TNI Dr. Syarifudin Tipe, S.IP, MSi, Rektor Universitas Pertahanan Indonesia.
2. Bapak Brigjen TNI Sonny ES Prasetyo, MA, Komandan Sekolah Strategi Perang Semesta, Universitas Pertahanan Indonesia.
3. Bapak Marsma TNI Dr. U.H. Harahap, MSi, Wakil Komandan Sekolah Strategi Perang Semesta, Universitas Pertahanan Indonesia.
4. Bapak Dr. Bantarto Bandoro, selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan bijak dan penuh kesabaran telah memberikan petunjuk dan arahan serta bimbingan-bimbingan yang sangat berharga hingga selesai tesis ini.
5. Bapak Rodon Pedrasan, M.A, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan koreksi dan pendampingan sangat berharga hingga penyelesaian tesis ini.
6. Ibu Prof. Sri Hartati D Reksodiputro Suradijono Ph.d, selaku Dewan Penguji yang berkenan memberikan masukan-masukan dalam penyempurnaan Tesis.
7. Ibu Dr. G. Ambar Wulan, selaku Dewan Penguji yang berkenan memberikan masukan-masukan dalam penyempurnaan Tesis.

8. Bapak Bonggas Adi Chandra, MSI, selaku Dewan Penguji yang berkenan memberikan masukan-masukan dalam penyempurnaan Tesis.
9. Bapak Dr.Yohanes Sulaiman, selaku Dosen Konsultan, yang berkenan memberikan koreksi dan tanggapan terhadap isi dan kandungan tesis.
10. Para Dosen Pengajar Universitas Pertahanan Indonesia dan rekan-rekan yang telah membantu memberikan inspirasi, saran dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
11. Bapak Brigjen TNI Dasril Elyas, Direktur “C” Bais TNI, dan Staf yang telah membantu peneliti dalam pencarian data penelitian.
12. Para pejabat terkait, para Romo dan Pendeta yang telah berkenan memberikan masukan data terhadap penelitian penulis.
13. Dan tak lupa kepada Istri dan anak-anak yang selalu mendorong semangat penelitian penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatNya dan membalas amal kebaikan mereka, Amin. Akhir kata, dengan menyadari segala keterbatasan, penulis berharap karya yang jauh dari sempurna ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Agustus 2010

Penulis

(Benedictus Widjanarko)

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>LEMBAR ORISINALITAS TESIS</b> .....	v
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	vi
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1    Latar Belakang Masalah .....	1
1.2    Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian .....	6
1.3    Tujuan penelitian .....	7
1.4    Manfaat Penelitian .....	7
1.5    Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1    Konteks Penelitian .....	10
2.2    Definisi Gerakan Separatis .....	10
2.3    Komando Kewilayahan Pertahanan .....	11
2.4    Teori Kepemimpinan .....	12
2.5    Teori Konflik .....	13
2.6    Sikap Gereja Terhadap Negara .....	14
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
3.1    Jenis dan Metode Penelitian .....	16
3.2    Teknik Pengumpulan Data .....	17
3.2.1 Pengumpulan Data Menggunakan Study Kepustakaan .....	17
3.2.2 Pengumpulan Data Menggunakan Teknik Wawancara .....	17
3.2.3 Pengumpulan Data Menggunakan Teknik Observasi .....	18
3.3    Teknik Analisa Data .....	18
3.4    Fokus Penelitian .....	19

<b>BAB IV</b>	<b>PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENANGKAL GERAKAN SEPARATIS PAPUA</b>	
4.1	Akar Masalah Papua dan Berbagai Dimensinya .....	20
4.1.1	Akar Masalah Papua .....	21
4.1.2	Dimensi Sosial Ekonomi dan Politik Papua .....	27
4.1.3	Dimensi Keamanan Papua .....	29
4.1.4	Dimensi Pengaruh Asing .....	33
4.2	Upaya Menangkal Gerakan Separatis .....	34
4.2.1	Upaya Preventif Pemerintah Pusat .....	34
4.2.2	Upaya Preventif TNI Dalam Penyelesaian Konflik .....	39
4.2.3	Keterlibatan Tokoh Agama Dalam Menangkal Gerakan Separatis Papua .....	42
	4.2.3.1 Persepsi Tokoh Agama Kristen/Katholik Mengenai Isu Separatis Papua .....	45
	4.2.3.2 Peran Tokoh Agama Kristen/Katholik Dalam Mencegah Isu Separatis Papua .....	46
	4.2.3.3 Strategi Tokoh Agama Kristen/Katholik Mencegah Isu Separatis Papua .....	51
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
5.1	Kesimpulan .....	54
5.2	Rekomendasi .....	55
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	57
	<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	61
	<b>DAFTAR TABEL</b> .....	62
	<b>DAFTAR LAMPIRAN.</b>	

# **PERAN DAN STRATEGI TOKOH AGAMA DALAM MENANGKAL GERAKAN SEPARATIS PAPUA**

*dona nobis pacem  
berilah kami damai*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah.**

Sejalan dengan dihapuskannya Dwi Fungsi ABRI, telah terjadi perubahan-perubahan paradigma, redifinisi, restrukturisasi dan reinterpretasi terhadap peran dan fungsi TNI. Tugas memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini, adalah salah satu tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam upaya melaksanakan tugas tersebut, TNI melalui pembinaan teritorial menempatkan diri pada posisi membantu Pemerintah bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama mengedepankan cara-cara persuasif.

Pencegahan dan penanggulangan separatisme merupakan salah satu bagian penting dari agenda pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. Pembangunan seluruh wilayah negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, selalu dibarengi dengan upaya komprehensif pencegahan dan penanggulangan separatisme. Agenda tersebut telah terwadahi pada tugas tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang antara lain mencakup mengatasi gerakan separatis bersenjata dan mengatasi pemberontakan bersenjata.

Separatisme menjadi ancaman yang keberadaannya memperlihatkan proses regenerasi. Perjuangan ideologi separatis akan menjadi bahaya laten yang terus merongrong kedaulatan negara. Persoalan separatisme di Indonesia

sampai saat ini masih belum dapat dituntaskan, salah satunya adalah gerakan separatisme di Propinsi Papua. Ketahanan dan keutuhan NKRI selalu diuji oleh gerombolan yang menamakan dirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ideologi Papua merdeka terus digembar-gemborkan oleh kelompok separatisme, telah mempengaruhi generasi muda Papua yang tersebar di beberapa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gerakan separatis di Papua sampai kini menjadi isu yang belum menemukan bentuk pemecahan atau solusi, dengan menggunakan suatu strategi yang komprehensif.

Eksistensi kelompok OPM tidak terlepas dari kondisi sosial dan masih kuatnya dukungan dari sebagian kelompok masyarakat simpatisan, menjadikan perjuangannya terus berkelanjutan dan belum surut. Demikian juga tidak menutup kemungkinan terhadap NGO atau missionaris asing yang mempunyai muatan politis, dapat membantu perjuangan gerakan separatisme karena mempunyai kemampuan melakukan pendekatan ke daerah perkampungan warga pedalaman Papua.

Banyak ahli menyepakati bahwa separatisme merupakan permasalahan kompleks akibat akumulasi permasalahan politik, ekonomi dan keamanan yang saling tumpang tindih. Gangguan separatis OPM merupakan salah satu masalah disintegrasi bangsa yang cukup krusial, bersifat multikompleks dan multidimensional. Selo Sumardjan menyatakan bahwa "konflik sosial secara horizontal dan vertikal yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia berakar pada sejumlah faktor struktural. Kecemburuan sosial yang muncul akibat adanya gap sosial dan ekonomi pada berbagai kelompok masyarakat merupakan sumber utama konflik<sup>1</sup>.

Munculnya konflik gerakan separatis selalu dihubungkan dengan permasalahan pemerataan pembangunan yang tidak kunjung nyata di bumi Papua. Hasil penelitian Tim Papua LIPI (2004) menjelaskan bahwa sumber konflik Papua mencakup empat isu strategis sebagai berikut : Sejarah integrasi Papua ke wilayah NKRI dan identitas politik orang Papua; Kekerasan politik dan pelanggaran HAM; Gagalnya pembangunan di Papua; dan inkonsistensi Pemerintah dalam implementasi Otonomi khusus (Otsus) serta marginalisasi orang

---

<sup>1</sup> . Soemardjan, Selo,(2002) Konflik-konflik sosial di Indonesia, *Analisis CSIS, Tahun XXXI/2002*, hal306.

Papua.<sup>2</sup> Namun dibalik hal tersebut, bahwa konflik antara kelompok separatis dengan Pemerintah pusat sebetulnya lebih disebabkan karena adanya faktor kepentingan dari petualang politik yang selalu menghembuskan permasalahan krusial dan berdampak terhadap keamanan wilayah, antara lain seperti : (i) Rasa ketidak-adilan dan ketidak-puasan terhadap Pemerintah Pusat, (ii) trauma tindakan represif militer, (iii) kurang efektifnya komunikasi pemerintah dan masyarakat dan (iv) adanya perbedaan cara berfikir dan kepentingan antar elit politik dan masyarakat pada umumnya dan (v) persoalan nasionalisme sempit. Pernyataan yang bersifat penciptaan opini ini, sepertinya merupakan wacana mengangkat permasalahan status politik Papua untuk terus digulirkan oleh kelompok atau simpatisan terhadap gerakan OPM ke forum internasional. Selanjutnya, Sampai detik ini bahwa sepak terjang gerombolan OPM terus berusaha menarik perhatian dunia.

Karena itu, untuk mengeliminir pergerakan OPM salah satunya adalah dengan cara meningkatkan pembangunan di Papua. Pemerintah Indonesia melalui kebijakan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua) nomor 21 Tahun 2001, menekankan empat prioritas utama mencakup sektor : pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, dan infrastruktur.<sup>3</sup> Tidak kurang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan perhatian khusus terhadap penyelesaian separatis Papua dengan menyatakan komitmennya bahwa pemerintah akan menyelesaikan konflik Papua secara damai, adil, bermartabat dengan menekankan pendekatan dialog dan persuasive<sup>4</sup>.

Kecenderungan paradigma Global, Regional dan Nasional dimana persepsi positif secara umum dapat menerima pendekatan dialogis sebagai penyelesaian konflik, maka pendekatan ini dapat dinilai sebagai sebuah strategi yang dapat digunakan Pemerintah Republik Indonesia dalam menangani gerakan separatis di Papua, yang diikuti keinginan seluruh masyarakat secara bersinergi untuk ikut mengupayakan penyelesaian konflik di Papua dalam bingkai NKRI. Sebaliknya,

---

<sup>2</sup> . Widjoyo, Muridan S., dkk, (2008) , *Papua Road Map (Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*, Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI), Jakarta, hal 7

<sup>3</sup> . <http://apakabar.ws/forums//viewtopic.php?f=1&t=39767>, diakses tanggal 1 Desember 2009.

<sup>4</sup> . *Pidato\_Kenegaraan\_Presiden\_Republik\_Indonesia,\_16\_Agustus\_2005* dalam <http://id.wikisource.org/wiki/>, diakses tgl 12 Pebruari 2010

kondisi politik yang terus memanas di Papua menyebabkan pendekatan dialogis pun bukan menjadi impian dalam menyelesaikan masalah separatisme. Penerapan pendekatan cara dialog diperlukan suatu kajian yang mampu menyoroti plus minusnya pendekatan tersebut. Contoh kasus upaya dialogis yang diprakarsai pemerintah pada tanggal 26 Pebruari 1999. Pemerintah menyelenggarakan "Dialog Nasional" yang melibatkan Presiden RI, 21 Menteri dan unsur Muspida Papua dengan 100 tokoh masyarakat Papua yang dipimpin Tom Beanal. Pada event tersebut, Tom Beanal (tokoh separatis Papua) dengan congkaknya menyampaikan pernyataan sebagai berikut : "bangsa Papua berkehendak keluar dari NKRI untuk merdeka dan berdaulat penuh".<sup>5</sup> Pernyataan Tom Beanal itu mencerminkan apa yang dikatakan oleh Holsti (1996) bahwa *"these are conflicts in which communities seek to create their own states in wars of 'national liberation', or which 'involve resistance by various peoples against domination, exclusion, persecution, or dispossession of lands and resources, by the post colonial state."*<sup>6</sup> Kenyataan tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan penyelesaian dengan cara pendekatan dialog dengan kelompok separatis Papua masih belum sesuai keinginan dan tujuan Pemerintah.

Presiden Yudhoyono pernah menyampaikan dihadapan publik tentang komitmennya menyelesaikan konflik Papua secara demokratis dan damai seperti penyelesaian masalah di NAD. Namun, banyak tokoh percaya bahwa dengan mengedepankan cara demokratis dan penyelesaian dengan pendekatan dialogis kultural dimungkinkan akan sangat diterima oleh kalangan masyarakat Papua.<sup>7</sup> Pemerintah Indonesia telah memperlihatkan beberapa penyelesaian masalah konflik dengan melibatkan tokoh adat maupun tokoh agama seperti di Poso, Maluku maupun di wilayah lainnya. Untuk itu guna mencapai situasi kondusif dalam pelaksanaan kebijakan yang persuasif, dibutuhkan kerjasama seluruh komponen bangsa dengan melibatkan TNI, tokoh masyarakat dan tokoh agama

<sup>5</sup> . Widjoyo, Muridan. S, Tahun 2009, *Papua Road Map*, hal 156

<sup>6</sup> . Miall, Hugh, Oliver Ramsbotham, and Tom Wodhouse, (1999) *Contemporary Conflict Resolution*, Cambridge: Polity. hal 69.

<sup>7</sup> . Andawat, (2010) *Dialog Jakarta – Papua: Masih Penuh Kekhawatiran dan Kecurigaan (bagian pertama)*, dalam <http://papua.blogspot.com/2010/02/Dialog-Papua-Jakarta-Masih-Penuh-Kekhawatiran-dan-Kecurigaan.html>, diakses tanggal 9 Juni 2010, jam 09.40

untuk menangkal keinginan separatis Papua melepaskan diri dari kedaulatan wilayah NKRI. Tokoh agama memiliki peran signifikan dalam penyelesaian maupun pemecahan konflik. Kasus konflik di Timor Timur menunjukkan bahwa peran tokoh Agama (Uskup Belo) sangat dominan membantu perjuangan kelompok anti NKRI. Demikian pula contoh kasus di Negara tetangga, Philipina, memperlihatkan bahwa dukungan kuat Kardinal Sin terhadap Curazon Aquino mampu menjatuhkan dominasi Ferdinand Marcos. Karena itu, pendekatan terhadap para tokoh agama dapat dijadikan sebagai bagian dari strategi pemerintah Indonesia dalam penyelesaian masalah separatis di Papua.

Terdapat benang merah yang diidentifikasi sebagai faktor yang mendorong keinginan sebagian masyarakat Papua untuk bergabung mendukung kelompok Separatis, atau sebagai simpatisan yang melakukan konflik dengan Pemerintah Indonesia antara lain menyangkut masalah : kemiskinan, pengangguran, kesehatan, SARA, kesenjangan sosial antara penduduk asli dengan pendatang dan marginalisasi (memandang rendah terhadap Suku asli Papua).

Menyadari adanya kompleksitas permasalahan, serta adanya keinginan untuk memberikan pemahaman yang utuh, perlu dicari dan dikaji akar permasalahan terjadinya konflik tersebut melalui pendekatan komprehensif integral dengan meninjau berbagai permasalahan diberbagai aspek kehidupan meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam dan agama. Pemerintah telah berupaya melakukan pendekatan dari beberapa aspek, tetapi penulis melihat bahwa upaya pendekatan melalui aspek keagamaan masih belum dilakukan secara maksimal. Upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh pihak Pemerintah khususnya melalui pendekatan keamanan dengan militer sebagai ujung tombak dinilai sudah tidak realistis, sehingga pendekatan persuasive melalui dialogis cultural yaitu melalui metode spiritual (*religious* /keimanan) dapat menjadi alternatif solusi yang perlu diupayakan dan ditingkatkan oleh Pemerintah Indonesia. Pandangan ini merujuk pada keinginan kuatnya masyarakat Papua pada umumnya akan penyelesaian konflik dengan cara dialogis. Dengan demikian Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah dan Komando Wilayah TNI beserta komponen bangsa lainnya, perlu memberikan ruang dan mendorong para tokoh agama di Papua untuk ikut andil dalam

penyelesaian masalah dengan gerakan separatis di Papua agar tidak terjadi disintegrasi bangsa.

## **1.2 Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian.**

Permasalahan separatis Papua menjadi isu sensitif bagi kedaulatan dan integritas NKRI, karena itu penanganannya perlu mendapat perhatian khusus dan kontinyu untuk mencegah adanya kecenderungan peningkatan aspirasi pemisahan diri.

Akibat gangguan separatis, dapat berimplikasi pada disintegrasi bangsa apabila tidak dilakukan penanganan baik secara preventif ataupun secara represif. Secara garis besar, permasalahan gerakan separatis di propinsi Papua sebagai berikut:

- (i) Solidaritas sempit gerombolan separatis telah mengingkari kedaulatan NKRI dan karena itu akar masalah gerakan separatis tetap eksis dan berkembang di propinsi Papua.
- (ii) Penghayatan kehidupan sebagai separatis cukup kental mewarnai generasi pemuda Papua.
- (iii) Upaya TNI untuk memberantas separatis belum optimal.
- (iv) Tokoh agama yang berpengaruh besar terhadap masyarakat, kurang dimanfaatkan secara optimal.

Derasnya tuntutan dialog yang terus digulirkan oleh sebagian masyarakat simpatisan OPM adalah hal yang sangat rawan bagi stabilitas keamanan karena disamping ideologi yang ditujukan jelas yaitu lepas dari NKRI dan membentuk negara baru, Pemerintah harus mampu menyiapkan segala perangkatnya baik perangkat lunak (piranti lunak) maupun perangkat keras (piranti keras) di Papua, sehingga hal tersebut tidak bisa dianggap sebagai pekerjaan yang ringan bagi Pemerintah. Pemerintah perlu mempertimbangkan apakah sarana dialog merupakan cara yang terbaik dalam menyelesaikan konflik di Papua, mengingat pada dialog yang dilakukan terdahulu belum mencapai titik temu antara kedua belah pihak. Tuntutan merdeka dan lepas dari NKRI terus dihembuskan

kelompok OPM sebagai harga mati, dan menjadi sangat jelas bahwa dialog sampai sekarang ini belum berjalan dengan baik.

Sebagai upaya pembinaan masyarakat di Komando Kewilayahan TNI, maka perlu melibatkan para tokoh agama untuk dijadikan sebagai jembatan pendekatan memasukan kebijakan Pemerintah ke masyarakat. Pelibatan dalam arti mengajak dan mengikutsertakan para tokoh agama untuk berperan serta secara aktif dalam persoalan yang muncul di masyarakat.

Dengan penunjukkan tokoh agama khususnya dari agama mayoritas penduduk Papua yang berarti secara langsung dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat Papua, hal ini nampaknya merupakan solusi alternatif yang perlu dipertimbangkan. Disamping hal tersebut, pemberdayaan wilayah pertahanan melalui peran tokoh agama diharapkan akan dapat menangkal sejak dini gejala munculnya gerakan separatis.

Dengan latar belakang permasalahan demikian, maka tesis ini mencoba menganalisis *”peran dan strategi para Tokoh Agama Kristen / Katholik dalam membantu pemerintah menangkal gerakan kelompok Separatisme di Papua?”*

### **1.3 Tujuan Penelitian.**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelibatan para pimpinan agama di Papua dalam membantu Pemerintah mengatasi bahaya separatisme yang mengganggu stabilitas keamanan di propinsi Papua. Secara khusus tesis ini bertujuan menganalisis peran dan strategi tokoh agama Kristen /Katholik dalam mencegah tumbuh suburnya gerakan separatisme di Papua

### **1.4 Manfaat Penelitian.**

Hasil penelitian yang pasti akan memiliki manfaat dan kegunaan dalam penambahan pengetahuan dan sebagai masukan bagi pengambil kebijakan sebagai berikut :

1. Dari aspek teoritis, hasil penelitian akan memperkaya referensi tentang pencegahan gerakan separatis di Indonesia pada umumnya dan propinsi Papua pada khususnya.
2. Manfaat praktis hasil penelitian, adalah menjadi bahan masukan bagi pelaku di lapangan dalam mengidentifikasi dan penanganan gerakan separatisme yang mengganggu keutuhan NKRI.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan, baik pemerintah Daerah maupun Pusat, termasuk juga dikalangan bagi para tokoh agama di Papua dalam usaha bela negara dengan mencegah timbulnya gerakan separatisme.

### **1.5 Sistematika Penelitian.**

Dalam penulisan tesis ini, penulis membagi menjadi 5 (lima) bagian yang tersaji dalam uraian penulisan sebagai berikut :

Bab pertama, menjelaskan tentang hal-hal yang berkenaan dengan latar belakang dilakukan penelitian dan memilih topik penelitian. Selanjutnya, Bab ini menjelaskan secara umum tentang isi dari penelitian. Pembahasan meliputi : Latar Belakang yang akan diteliti; Perumusan Masalah berisi permasalahan-permasalahan yang akan dikaji; Tujuan Penelitian, berisi pokok-pokok tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian; Manfaat Penelitian, berisi tentang uraian singkat hasil penelitian.

Bab kedua, berisi penjelasan beberapa tinjauan pustaka, meliputi : Konteks penelitian, Definisi gerakan separatis; Komando Kewilayahan Pertahanan; Teori kepemimpinan; Teori konflik; dan Sikap Gereja terhadap negara.

Bab ketiga, berisi penjelasan tentang metode penelitian. Bab ini membahas : Metode dan jenis penelitian; Teknik pengumpulan data; Teknik analisa data; dan Fokus penelitian.

Bab keempat, berisi penjelasan berbagai temuan lapangan kondisi saat ini dan analisis pembahasan yang meliputi : Akar Masalah Papua dan berbagai Dimensinya; dan Upaya menangkal gerakan separatis. Selanjutnya, pada Bab kelima (bab penutup) menyimpulkan persoalan konflik yang terjadi di propinsi Papua dan tokoh agama dalam bertindak sehingga terwujud keutuhan NKRI, berikut saran-saran terhadap implikasi kebijakan penanganan konflik.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Konteks Penelitian.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan bahwa hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri<sup>8</sup>.

Mengacu pada pasal tersebut dan terkait dengan penanganan konflik vertikal dengan kelompok separatis Papua, mengartikan bahwa masalah separatisme sesungguhnya bukan semata-mata urusan aparat keamanan negara, melainkan melibatkan seluruh komponen masyarakat termasuk para tokoh agama dan birokrasi yang secara bersama mempunyai tanggung jawab dalam penyelesaian konflik.

Dalam konteks penelitian, teori yang terkait dengan penyelesaian konflik akan dijadikan sebagai landasan dalam penulisan tesis.

#### 2.2 Definisi Gerakan Separatisme.

Separatisme adalah suatu usaha dan tindakan untuk mencari keuntungan dengan memecah belah suatu organisasi yang dilakukan sekelompok orang dengan menggunakan kekuatan bersenjata dengan cara menentang pemerintahan yang sah. Perkembangan di Indonesia saat ini manuvernya menggunakan *front Politik, front Klandestin, front Bersenjata dan front Penggalangan Massa*<sup>9</sup>. Beberapa pemerhati yang terkait dengan pergerakan Separatisme di Papua, salah satunya Ikrar Nusa Bhakti, menyatakan antara lain bahwa munculnya gerakan separatisme dikarenakan : Masih kuatnya tradisi separatisme di wilayah tersebut; Masih trauma terhadap kebijakan politik, keamanan, dan ekonomi di masa lalu

---

<sup>8</sup>. <http://www.tni.mil.id/news.php?q=dtl&id=1837>, diakses tgl 28 Desember 2009

<sup>9</sup>. Kamus Istilah Hankam Jilid I, disadur oleh Zamzani, *Karlis*, hal 4

muncul kembali; Terjadinya modernisasi yang keliru yang lebih menonjolkan pembangunan fisik dan perubahan sosial-budaya menuju Indonesiaisasi yang terlalu dipercepat; Masih adanya rasa sakit hati bekas pendukung Indonesia; Terlalu kuatnya korupsi, kolusi, nepotisme di kedua wilayah itu dan Terlalu lambannya pribumisasi di pemerintahan, baik di Irian Jaya dan Timor Timur.<sup>10</sup>

Pandangan tersebut nampaknya sedikit berbeda bagi kelompok OPM, yaitu bahwa penekanan pemisahan yang diupayakannya adalah pada pemisahan politis bukan pemisahan etnis semata. Karena perjuangan yang dilakukan oleh Separatis Papua adalah gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan diri dari NKRI melalui cara damai atau referendum.

### **2.3. Komando Kewilayahan Pertahanan.**

Sesuai UU RI No 34 Tahun 2004, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Demikian juga berdasarkan UUD'45 pasal 27 ayat 3 dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban melakukan bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara. Penegasan tersebut menjadikan dasar untuk memposisikan dan menempatkan TNI sebagai komponen utama dan dibantu dengan komponen cadangan serta komponen pendukung lainnya termasuk para tokoh agama Kristen/Katholik di Papua untuk terlibat dalam perang semesta terkait dengan upaya bela negara. Menghadapi permasalahan-permasalahan bangsa tidak hanya dapat dilaksanakan melalui tindakan penegakan hukum saja, namun perlu kepedulian dari segenap bangsa untuk melakukan pembinaan sebagai upaya melakukan langkah preventif dengan menjadikan wilayah dengan semua komponennya sebagai wilayah pertahanan.

---

<sup>10</sup>. Nusa Bhakti, Ikrar, *Reformasi dan Separatisme*,  
<http://www.tempo.co.id/ang/min/03/22/kolom2.htm>, diakses tanggal 19 Oktober 2009, Jam 19.45

Dalam kaitan diatas, TNI secara struktural telah membagi menjadi 3 (tiga) Komando wilayah (Kowil). Ketiga wilayah tersebut masuk kedalam wilayah masing-masing angkatan yaitu : (i) Kodam (TNI-AD), (ii) Komando Armada (TNI-AL) dan (iii) Komando Operasional (Koops). Komando wilayah (Kowil) TNI merupakan kegiatan utama bagi TNI dalam memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya, yang dilakukan secara terus menerus dalam kerangka Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta dengan memantapkan kemandirian TNI-Rakyat. Pada dasarnya kegiatan pembinaan teritorial oleh TNI, jauh-jauh sebelumnya telah dilaksanakan secara koordinatif, terpadu, saling terkait dan lintas sektoral, yang operasionalnya dilakukan oleh komando kewilayahan, satuan non-kewilayahan dengan obyek geografi, demografi dan kondisi sosial kemasyarakatan, dimana sebelumnya terealisasi melalui program ABRI Masuk Desa (AMD) maupun program sosial lainnya.

#### 2.4 Teori Kepemimpinan.

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang menggerakkan orang lain atau organisasi untuk melakukan sesuatu yang diinginkannya (*leadership is the ability to lead*). Ditinjau sebagai seni mempengaruhi orang lain, menurut "Munson (1921) yang disadur oleh Mar'at " *Pemimpin dan Kepemimpinan*", Ghalia Indonesia Jakarta ( 2006) mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan meng-*handle* orang lain untuk memperoleh hasil maksimal dengan friksi sesedikit mungkin dan kerjasama yang besar. Demikian pula Allport (1924) menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan kontak langsung atau tatap muka antara pemimpin dan pengikut yang merupakan sosial kontrol personal"<sup>11</sup>. Sedangkan Norman Shwarzkopf berpendapat bahwa "Kepemimpinan adalah gabungan antara strategi dan karakter, bila harus memilih diantara keduanya maka pilihlah yang kedua, karakter. Secara implisit terbaca bahwa karakter seorang pemimpin sangat menentukan tingkat keberhasilan dalam menerapkan kepemimpinan.<sup>12</sup> Pada sisi lain, penjelasan psikoanalitis tentang karisma

---

<sup>11</sup>. Mar'at, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Ghalia Indonesia Jakarta 2006

<sup>12</sup>. Prabowo JS, 2009, *Kepemimpinan Strategis*, hal 9, hal 19

memberikan kejelasan kepada kita bahwa pengaruh dari pemimpin berasal dari identifikasi pribadi dengan pemimpin tersebut.<sup>13</sup>

Teori kepemimpinan menjadi dasar penulisan tesis untuk dituangkan kedalam sebuah pemikiran. Akankah peran dan strategi tokoh agama di Papua, dapat mampu meredam, menghambat, menangkal bahkan mengeliminasi tumbuhnya gerakan separatis secara dini. Peneliti mencoba menghadapkan hipotesa ini dengan Teori Kepemimpinan sehingga didapatkan suatu kajian ilmiah tentang mampu tidaknya peran Tokoh agama dalam mengeliminasi gerakan separatis di Papua.

Dari beberapa definisi tersebut diatas, secara sederhana dapat dijabarkan bahwa kepemimpinan mengandung unsur meliputi : pemimpin, pengikut, mempengaruhi, dan visi atau tujuan yang ingin dicapai. Sehingga teori kepemimpinan ini nampaknya sangat relevan untuk diterapkan pada penelitian yang menyangkut pribadi dari para tokoh agama. Penentuan pada hasil yang dicapai akan dapat terlihat dari peran maupun strategi yang dilaksanakan para tokoh agama dalam berkomunikasi terhadap kehidupan kesehariannya.

Dalam kehidupan gerejani, tokoh agama mempunyai pengaruh yang dijadikan sebagai panutan oleh masyarakat. Maka dalam kaitan dengan tesis ini, Penulis memfokuskan pada metode pendekatan "dialog keimanan" sebagai kerangka berpikir dalam memberdayakan peran tokoh agama Kristen/Katholik di lingkungan komando wilayah TNI untuk mampu mempengaruhi atau merubah moralitas masyarakat kelompok separatis kembali ke NKRI.

## **2.5 Teori konflik.**

Secara harafiah konflik berarti percekocokan, atau pertentangan. Konflik sebagai perselisihan terjadi akibat adanya perbedaan, persinggungan dan pergerakan. Konflik tidak dapat dielakan dari kehidupan manusia karena setiap orang memiliki cara hidup yang khas, kepentingan pribadi, termasuk kepentingan kelompok yang menjadi salah satu faktor dominan menjurus ke pertikaian

---

<sup>13</sup>. <http://massofa.wordpress.com/2008/02/05/teori-kepemimpinan/>, diakses tanggal 20 Juni 2010, jam 10.32

berdarah<sup>14</sup>. Konflik yang terkait dengan kedaulatan dan keutuhan wilayah, tidak hanya berasal dari luar negeri saja tetapi juga bisa terjadi di dalam negeri misalnya pemberontakan bersenjata yang diwarnai dengan ide separatisme, sehingga lebih tepat bahwa konflik dapat dikategorikan sebagai perang (meski resolusi konfliknya tidak harus menggunakan cara-cara militer).<sup>15</sup> Sedangkan Samuel P. Huntington dalam tulisannya tentang "benturan antar peradaban" menyatakan bahwa komonalitas kultural mampu memfasilitasi hubungan dan kerjasama antara pelbagai masyarakat dan kebudayaan yang berbeda-beda dalam mencegah terjadinya konflik dan perpecahan<sup>16</sup>.

## 2.6. Sikap Gereja terhadap negara.

Gereja menghargai sistem demokrasi, karena membuka wewenang yang luas bagi warganegara untuk berperanserta dalam penentuan kebijakan-kebijakan politik, lagi pula memberi peluang kepada rakyat bawahan untuk memilih para pemimpin, tetapi juga meminta pertanggung jawaban dari mereka. Gereja tidak mendukung pembentukan kelompok-kelompok kepemimpinan yang "tertutup", dan penyalahgunaan kekuasaan negara demi keuntungan-keuntungan perorangan, atau berdasarkan asas-asas ideologi tertentu. Gereja berperan serta mengukuhkan perdamaian dan meletakkan dasar yang tangguh bagi persekutuan persaudaraan antar umat manusia dan antar bangsa yakni: pengertian akan hukum ilahi dan kodrati.<sup>17</sup>

Dalam menanggapi dan menyikapi berbagai kecenderungan, perkembangan dan perubahan di Tanah Air, pada tanggal 26 Februari 1999, Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menyampaikan beberapa pokok pikiran terkait dengan pentingnya Dialog Nasional Irian Jaya. Masalah Irian Jaya tidak boleh ditanggapi dan disikapi secara sambil lalu, melainkan harus secara serius dan khusus. Sebab masalah Irian Jaya tidak hanya menyangkut masalah persatuan dan kesatuan bangsa semata, tetapi

<sup>14</sup>. Francis, Diana, Teori dasar transformasi konflik social, hal 7

<sup>15</sup>. Prabowo, J Suryo, Pokok2 Pemikiran tentang Perang Semesta, hal 52

<sup>16</sup>. Huntington, Samuel P, Benturan antar peradaban, Penerbit Qalam, hal 221

<sup>17</sup>. Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1999, kumpulan dokumen Ajaran social Gereja

tahun 1891-1991, hal 871, hal 391

sekaligus juga masalah HAM yang menjadi sorotan dunia. Dengan demikian penanganan masalah Irian Jaya harus ditempatkan pada skala prioritas yang paling tinggi.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> . Sairin, Mth, Weinata, 2002, Pesan-Pesan Kenabian di Pusaran Zaman, hal 134.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3. 1 Jenis dan Metode Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Vendenberg, Jacob menyebutkan bahwa metode penelitian deskriptif merupakan bagian menentukan langkah-langkah melakukan reinterpretasi tentang fenomena-fenomena sosial yang terdapat dalam permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, J Moleong Lexy, menyebutkan bahwa menggunakan metode penelitian kualitatif terdapat beberapa pertimbangan antara lain (i) Metoda kualitatif mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. (ii) Metoda ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan obyek yang diteliti. (iii) Metoda ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola yang dihadapi<sup>19</sup>.

Jenis penelitian deskriptif adalah dengan cara mencoba menggambarkan dan memaparkan secara jelas mengenai suatu kejadian yang pernah atau sedang berlangsung berdasarkan data-data, fakta-fakta dan dokumen-dokumen yang ada. Whitney, mengartikan penelitian deskriptif adalah suatu pencarian fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat, dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat mengenai hubungan-hubungan antara fenomena yang diselidiki<sup>20</sup>.

Penelitian yang akan disajikan penulis adalah obyek penelitian deskriptif yaitu dengan mencari masukan atau tanggapan dari sekelompok masyarakat secara umum ataupun dari para tokoh agama kristen/katholik khususnya terkait dengan peran tokoh agama apakah mampu memainkan perannya dalam

---

<sup>19</sup>. J.Moleong Lexy (2002), *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung. hal 5

<sup>20</sup>. Nazir, Muhammad (1998), *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, [http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/01/lapo\\_sp\\_litmud\\_07.pdf](http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/01/lapo_sp_litmud_07.pdf), jam 24 Pebruari 2010

penyelesai konflik Papua. Dan dalam hal ini, persepsi pemuda dan mahasiswa menjadi subyek penelitian. Seperti dikemukakan Nawawi (1987)<sup>21</sup>, mengemukakan bahwa subyek ataupun obyek penelitian sosial dapat berupa individu, masyarakat, institusi dan lain-lain berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

### **3.2 Teknik Pengumpulan Data.**

Tehnik pengumpulan data yang dilaksanakan oleh penulis, meliputi (i) wawancara dan observasi, maupun (ii) dalam bentuk studi kepustakaan. Peneliti dibantu oleh Tim pencari data dalam upaya mendapatkan hasil jawaban pertanyaan yang diinginkan oleh peneliti, dengan obyek penelitian ditujukan kepada masyarakat, mahasiswa, pejabat setempat maupun dari tokoh agama itu sendiri.

#### **3.2.1 Pengumpulan Data menggunakan Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan adalah bagian penting dari cara pengumpulan data, yang mana digunakan untuk menyusun kerangka penelitian. Selanjutnya dengan studi kepustakaan, akan didapatkan informasi data sekunder dari sumber-sumber informasi seperti: laporan, buku/literatur, catatan, laporan dari koran, majalah, internet dan sebagainya. Atas dasar pemikiran tersebut, Penulis telah menggunakan beberapa referensi terkait dengan judul tesis mengenai peran para tokoh agama Kristen/katholik

#### **3.2.2 Pengumpulan Data menggunakan Teknik Wawancara.**

Teknik wawancara dilakukan dengan mewancarai beberapa orang selaku informan yang mengetahui duduk perkara sebuah kasus, menyaksikan atau kepada orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam peristiwa tersebut. Teknik wawancara menggunakan kuesioner ditujukan kepada kelompok pemuda, mahasiswa dan pelajar di propinsi Papua. Wawancara didasarkan pada daftar

---

<sup>21</sup> Nawawi, Hadari, (1987), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, hal 47.

pertanyaan yang telah disiapkan. Selanjutnya hasil wawancara dikumpulkan dan diklasifikasikan dalam bentuk uraian, tabel ataupun gambar grafik.

### **3.2.3 Pengumpulan Data menggunakan Teknik Observasi**

Pengumpulan data menggunakan teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Penelitian dengan melakukan pengumpulan data dengan cara observasi dan pengamatan langsung di propinsi Papua adalah bagian sangat penting guna memahami kondisi dan kultur masyarakat Papua.

Tim Pencari Data melakukan observasi ke masyarakat termasuk didalamnya interaksi dengan kalangan pejabat pemerintah daerah maupun sampai ke tingkat kelurahan atau desa, para tokoh agama Kristen/ Katholik dan masyarakat, misionaris, anggota masyarakat dan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal atau Non Government Organization (NGO).

### **3.3 Teknik Analisa Data.**

Bahan keterangan atau data-data yang berhasil dikumpulkan, akan diolah melalui tahapan sebagai berikut : Klasifikasi, komparasi, kajian / analisa dan interpretasi. Pengklasifikasian terhadap data-data dengan cara mengelompokkan sesuai dengan yang terkait, merupakan salah satu upaya untuk mempermudah dalam membandingkan yang satu dengan lainnya. Kegiatan komparasi sangat diperlukan untuk membandingkan data yang sejenis agar didapatkan informasi yang lebih akurat dan mendekati kebenarannya. Sedangkan dalam menganalisa data atau bahan keterangan yang diperoleh, penulis menggunakan pisau analisis dengan metode SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Treat), sehingga diharapkan akan dapat menggali permasalahan-permasalahan yang belum terlihat sebagai upaya penyelesaian.

### **3.4. Fokus Penelitian.**

Dengan mencermati wilayah pergerakan kelompok Separatis Papua, yang bergerak melalui jalur Politik (KSP) dan melalui jalur bersenjata (KSB), maka upaya mencari bahan informasi dilakukan bukan hanya tertuju pada daerah penelitian di wilayah Propinsi Papua dan Papua Barat saja, namun tidak menutup kemungkinan juga berada di luar negeri melalui bantuan para diplomat RI khususnya Staf kantor Atase Pertahanan/Penasehat Militer RI, di beberapa negara yang sering dimanfaatkan sebagai jalur kegiatan klandestinnya.

Dari survey data penelitian lapangan, Peneliti yang dibantu oleh Tim pencari data telah menyebarkan beberapa pertanyaan di wilayah Papua, khususnya kepada para mahasiswa Universitas Cendrawasih (Uncen), pejabat maupun tokoh agama di daerah Manokwari. Daerah tersebut adalah basis pemberontakan dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dimulai pada tanggal 26 Juli tahun 1965 di Manokwari yang dipimpin oleh Permenas Ferry Awom, bekas anggota Batalyon Sukarelawan Papua (Papua Vrijwilinger Corps) buatan Belanda, serta mempunyai event penting bagi perjuangan OPM dengan meninggalnya Theys Elloy selaku tokoh pergerakan. Waktu penelitian data sekunder terhadap aktivitas gerakan separatis Papua difokuskan pada periode 2007 s/d 2008.

## BAB IV

### PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENANGKAL GERAKAN SEPARATIS PAPUA

Kondisi geografi wilayah Papua yang luas, lokasi antar desa / kampung ke lainnya atau sekelompok keluarga ke lainnya pada umumnya berjauhan, berbukit bukit dan terjal, dan transportasi yang diperlukan untuk mencapai daerah pedalaman pada umumnya hanya terjangkau melalui media udara maupun melalui sungai, mendorong akses pendidikan kurang berkembang sehingga akan tercipta kualitas sumber daya manusia yang rendah dan rentan terhadap pengaruh luar. Yang pasti dan tidak bisa dipungkiri bahwa sampai saat ini yang mampu melaksanakan pendekatan ke daerah perkampungan warga pedalaman Papua adalah para tokoh agama, missionaris maupun NGO, dalam upaya membantu meningkatkan kesejahteraan maupun memberikan pengetahuan keimanan. Hal ini tentunya akan menjadi peluang sekaligus kerawanan dilihat dari sudut keamanan apabila mengandung unsur muatan politis.

Berdasarkan konsep pemberdayaan wilayah pertahanan yang terintegral kedalam tugas OMSP TNI, pemerintah perlu memberikan tempat bagi para tokoh agama mayoritas untuk ambil bagian dalam membentuk wilayah pertahanan. Bab ini secara khusus membahas masalah pemberdayaan para tokoh agama mayoritas atau masyarakat dalam mengurangi atau mengeliminasi gerakan separatis di Papua.

#### **4.1. Akar Masalah Papua dan berbagai Dimensinya.**

Sumber konflik Papua yang disajikan oleh Tim Papua LIPI (2004) mencakup empat isu strategis sebagai berikut : Sejarah integrasi Papua ke wilayah NKRI dan identitas politik orang Papua; Kekerasan politik dan pelanggaran HAM; Gagalnya pembangunan di Papua; dan inkonsistensi Pemerintah dalam implementasi Otonomi khusus (Otsus) serta marjinalisasi orang Papua. Penulis sependapat bahwa hal-hal tersebut sepertinya dijadikan sebagai *bargaining*

politik bagi petualang-petualang politik Papua guna mendasari perjuangan ideologinya untuk lepas dari NKRI.

Dari isu tersebut, dapat terlihat bahwa Konflik Papua yang merupakan konflik internal antara Pemerintah Indonesia dengan kelompok OPM, adalah sebagai akibat dari adanya jiwa nasionalisme Papua yang telah tertanam di dalam diri rakyat Papua. Demikian juga rasa nasionalisme kewilayahan yang mendorong rakyat Papua membenci adanya penjajahan terhadap mereka, baik yang dilakukan Belanda maupun Indonesia.

#### **4.1.1. Akar Masalah Papua.**

Dinas Sejarah Militer Kodam XVII/Cendrawasih<sup>22</sup>, menyebutkan ada 5 (lima) aspek yang menyebabkan pemberontakan OPM, yaitu:

- (i) Aspek Politik. Pada masa pemerintahan Belanda, pemerintah Belanda menjanjikan kepada rakyat Papua untuk mendirikan suatu negara (boneka) Papua yang terlepas dari negara Republik Indonesia. Beberapa pemimpin putra daerah yang pro-Belanda mengharapkan akan mendapatkan kedudukan yang baik dalam negara Papua tersebut. Janji pemerintah Belanda itu tidak dapat direalisasikan sebab Irian Jaya harus diserahkan kepada Indonesia melalui perjanjian New York 1962. Walaupun dalam perjanjian itu terdapat pasal tentang hak untuk menentukan nasib sendiri, namun pelaksanaannya diserahkan kepada Indonesia dan disaksikan oleh pejabat PBB. Apalagi pada tahun 1965 menyatakan keluar dari PBB, sehingga dukungan dari PBB tidak dapat diharapkan lagi.
- (ii) Aspek Ekonomis. Pada tahun 1964, serta tahun-tahun 1965 dan 1966, keadaan ekonomi di Indonesia pada umumnya sangat buruk, dan memberikan pengaruh yang sangat terasa di Irian Jaya. Penyaluran barang-barang kebutuhan pangan dan sandang ke Irian Jaya macet dan sering terlambat ditambah pula dengan tindakan para petugas Republik Indonesia di Irian Jaya yang memborong barang-barang yang ada di

---

<sup>22</sup>. <http://geociti.es/CapitolHill/Senate/4931/main4.htm>, diakses tanggal 8 Maret 2010, jam 21.57

toko dan mengirimnya ke luar Irian Jaya untuk memperkaya diri masing-masing. Akibatnya Irian Jaya mengalami kekurangan pangan dan sandang. Kondisi yang demikian ini tidak pernah dialami oleh rakyat Irian Jaya pada masa penjajahan pemerintah Belanda.

- (iii) Aspek Psychologis. Rakyat Irian Jaya pada umumnya berpendidikan kurang atau rendah di wilayah pesisir pantai dan di wilayah pedalaman tidak berpendidikan, sehingga mereka kurang berpikir secara kritis. Hal ini menyebabkan mereka mudah dipengaruhi. Mereka lebih banyak dipengaruhi emosi daripada pikiran yang kritis dan sehat dalam menghadapi suatu permasalahan. Bila suatu janji itu tidak ditepati maka sikap mereka akan berubah sama sekali. Misalnya sebagai bukti dalam hal ini adalah Mayor Tituler Lodwijk Mandatjan yang menyingkir 2 (dua) kali ke pedalaman Manokwari tetapi kembali lagi dan mengaku taat kepada pemerintah Indonesia.
- (iv) Aspek Sosial. Pada masa Belanda para pejabat pemerintah lokal di Irian Jaya pada umumnya diangkat dari kalangan kepala suku (dibanding dengan di Jawa dimana Belanda mengangkat pegawai dari golongan Priyayi). Kalau mereka itu memberontak maka mereka akan mendapat dukungan dan pengaruh dari sukunya serta dalam suasana yang genting pada kepala suku itu harus berada ditengah-tengah sukunya itu. Misalnya, Lodwijk Mandatjan.
- (v) Aspek Ideologis. Di kalangan rakyat Irian Jaya hidup suatu kepercayaan tentang seorang pemimpin besar sebagai Ratu Adil yang mampu membawa masyarakatnya kepada kehidupan yang lebih baik atau mak mur. Gerakan ini di Biak disebut gerakan Koreri (Heilstaat) atau Manseren Manggundi. Kepercayaan ini yang memberikan motivasi bagi pemberontakan yang dipimpin oleh M. Awom di Biak, dimana M. Awom dianggap sebagai pimpinan besar menyerupai Nabi Musa yang oleh para pengikutnya dianggap Sakti.

Dari lima aspek tersebut, sejarah integrasi Papua ke wilayah NKRI merupakan salah satu peristiwa yang selalu diungkit-ungkit oleh kelompok yang

menamakan dirinya Organisasi Papua Merdeka. Proses pelaksanaan Pepera sendiri mulai dilaksanakan tanggal 24 Juli sampai dengan Agustus 1969. Dilaksanakan di 8 Kabupaten, yaitu Merauke, Jayawijaya, Paniai, Fakfak, Sorong, Manokwari, Biak dan Jayapura oleh 1026 anggota Dewan Musyawarah Pepera (DMP) mewakili jumlah penduduk Papua yang berjumlah 809.327 jiwa. DMP tersebut terdiri atas 400 orang mewakili unsur tradisional (Kepala Suku/Adat), 360 orang mewakili unsur daerah dan 266 orang mewakili unsur organisasi politik/organisasi kemasyarakatan. Petugas PBB yang mewakili Sekjen PBB adalah Dubes Bolivia, Fernando Ortiz Sanz bersama-sama 16 orang pengawas PBB lainnya. Hasil dari Pepera yang digelar di 8 Kabupaten Irian Barat (Papua), semuanya memilih dan menetapkan dengan suara bulat bahwa Irian Barat merupakan bagian mutlak dari Republik Indonesia. Hasil tersebut disepakati dan disetujui dengan membubuhkan tanda tangan semua yang hadir dalam rapat Pepera tersebut. Ini menandai bahwa secara *de facto* masyarakat Papua memilih untuk berintegrasi dengan NKRI. Dengan dikeluarkannya Resolusi PBB nomor 2504 pada Sidang Umum PBB 19 November 1969, dengan 82 negara yang setuju, 30 negara abstain dan tidak ada yang tidak setuju, menunjukkan bahwa dunia Internasional sudah mengakui keabsahan Pepera 1969.<sup>23</sup> Semenjak periode 1963-1969, tujuan OPM ialah mempengaruhi hasil Pepera agar hasilnya adalah kemerdekaan melalui referendum (Singh 2008 :12).<sup>24</sup> Tindakan untuk terus berbuat makar dan berjuang untuk melepaskan diri dari kedaulatan NKRI, adalah merupakan upaya lanjutan dari tujuan semula pembentukan organisasi OPM. Dan yang menjadi penting bagi Pemerintah Indonesia adalah adanya solidaritas sempit dari gerombolan separatis Papua yang telah mengingkari kedaulatan NKRI, dan eksistensinya masih tetap berlanjut dalam rangka merongrong wibawa pemerintah.

Terkait dengan proses integrasi wilayah Irian Jaya (pendudukan Belanda saat itu) kedalam NKRI, didalam hukum organisasi internasional yang ditulis oleh

---

<sup>23</sup>. <http://www.tandef.net/menjawab-tantangan-papua-dalam-bingkai-nkri-bagian-I>  
Pendjelasan Persetujuan New York dari Tahun 1962 ke Tahun 1969, disadur oleh Agus Bhakti, Anggota Dewan Penasehat Harian TANDEF.

<sup>24</sup>. Widjoyo, Muridan S, tahun 2009, *Papua Road Map*, hal 23

D.W. Bowett Q.C.LL.D (Guru Besar Hukum Internasional University of Cambridge) yang diterbitkan oleh Sinar Grafika cetakan tahun 1992, menyebutkan Sistem Perwalian (*Trusteeship System*) adalah merupakan pengganti sistem mandat Liga Bangsa-Bangsa, pada dasarnya berpangkal pada gagasan suatu otoritas administrasi, sebagaimana biasanya dalam sebuah negara yang dibebani tanggung jawab untuk mengatur suatu wilayah yang rakyatnya belum cukup maju untuk melangkah ke tahap yang diperlukan bagi kemerdekaan atau pemerintahan sendiri, dan dalam beberapa hal bertanggung jawab secara internasional untuk mengatur administrasi di wilayah tersebut. Demikian di jelaskan bahwa wilayah-wilayah tersebut ditempatkan dalam 3 (tiga) kategori yaitu : Kategori A, B dan C sesuai dengan tingkat pembangunan yang telah dicapai. Kategori A secara implisit jelas wilayah tersebut pada akhirnya akan diberi kemerdekaan, Kategori B implikasinya kurang jelas, sedangkan Kategori C menjelaskan dengan adanya fakta-fakta bahwa wilayah-wilayah tersebut telah diurus sebagai suatu 'bagian integral' dari suatu wilayah negara yang disertai tanggung jawab administratif tersebut.<sup>25</sup>

Mencermati kategori diatas, bahwa penyerahan wilayah Papua oleh Belanda melalui Dewan Perwalian untuk menjadi wilayah kedaulatan NKRI yang berarti sudah memenuhi syarat yuridis menurut hukum internasional, sehingga keinginan kelompok separatis OPM untuk mendirikan negara Papua akan menyalahi kaidah hukum internasional. Menyadari hal tersebut, nampaknya kelompok separatis Papua akan terus bermain dibalik perlindungan Demokrasi, HAM dan Lingkungan hidup, yang perjuangannya melalui jalur Media Cetak dan Elektronik yang dinilai sebagai sarana perjuangan yang efektif untuk membentuk opini dan mampu menarik simpatisan.

Demikian pula dari sisi sejarah terbentuknya Organisasi Papua Merdeka seperti yang ditulis oleh George Junus Aditjondro tentang sejarah OPM (2009),<sup>26</sup> disebutkan bahwa OPM lahir dan tumbuh di Irian Jaya yang pada awalnya terdiri

---

<sup>25</sup>. Hukum organisasi internasional, D.W. Bowett Q.C.LL.D (Guru Besar Hukum Internasional University of Cambridge), Sinar Grafika cetakan tahun 1992, hal 85

<sup>26</sup>. Aditjondro, George Junus, 2009, Sejarah OPM, Organisasi papua Merdeka dalam <http://tangisantanag.blogspot.com/2009/05sejarah-opm-organisasi-papa-merdeka.html>, diakses tanggal 8 Maret 2010, jam 19.49

dari dua faksi utama yaitu organisasi atau faksi yang didirikan oleh Aser Demotekay pada tahun 1963 di Jayapura dan bergerak dibawah tanah. Faksi ini menempuh jalan kooperasi dengan pemerintah Indonesia serta mengaitkan perjuangannya dengan gerakan Cargo yang bercirikan spiritual yaitu campuran antara agama adat/gerakan Cargo dan agama Kristen. Organisasi ini muncul ke permukaan pada tahun 1970 setelah selesai PEPERA dan terus aktif membina para pengikutnya di Kabupaten Jayapura terutama di kecamatan-kecamatan pantai timur, pantai barat, Depapre dan Genyem. Demikian pula John Anari yang menulis tentang gerakan-gerakan kemerdekaan di kota Manokwari.<sup>27</sup> Dikatakan bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) semula didirikan di Manokwari pada Februari 1965, tepatnya di Sanggeng pada rumah keluarga Watofa, pertemuan ini dihadiri oleh seluruh komponen masyarakat di Kota Manokwari seperti kepala suku Arfak, Lodwik Mandacan, Barent Mandacan, Kepala Kepolisian Papua Mr. John Jambuani, Komandan PVK Mr. Permenas Ferry Awom dan beberapa anggota PVK-Polisi Papua dan Angkatan Laut Papoea seperti : Benyamin Anari, Terianus Aronggear, Mr. Marani, Fred Ajoi, Jimmy Wambrau, dan lain-lain. Organ ini didirikan dengan nama Organisasi Pembebasan Papua Merdeka (OPPM), hingga saat ini sengaja dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bahwa itu adalah OPM (Organisasi Papua Merdeka). Organisasi ini didirikan dengan dengan tujuan untuk bergelirya di seluruh daerah kepala burung (Vogel Kop) pulau Papua dengan dibentuknya tujuh (7) Batalyon Kasuari dan dibantu oleh beberapa Komandan Peleton. Berikut adalah ketujuh komandan Batalyon Kasuari tersebut, yaitu antara lain :

- i. Batalyon Kasuari I dipimpin oleh Ex. PVK Sergean Permenas Ferry Awom, beliau merangkap sebagai Panglima Umum. Dengan daerah Operasi yaitu Manokwari Kota dan Menyambow.
- ii. Marthinus Jimmy Wambrau (Komandan Batalyon Kasuari II) dengan daerah Operasi yaitu Pesisir Pantai Utara (Saukorem, Arfu, Numbrani, Sidei, dan Nuni).

---

<sup>27</sup>. Anari, John, <http://oppb.webs.com/sejarahopm.htm>, diakses tanggal 13 Desember 2009, Jam 20.29

- iii. Marthen Rumbiak (Komandan Batalyon Kasuari III) dengan daerah Gerilya yaitu Manokwari Timur (Ransiki, Windesi, Oransbari, dan Wasior).
- iv. Ex. Komandan Polisi Papua, Yohanes. C. Jambuani (John Caprini Jambuni) sebagai Komandan Batalyon Kasuari IV. Dengan daerah gerilya yaitu Warsnembri, Kebar, Saukorem dan Manokwari Kota).
- v. Silas wompere (Ex. Sergean PVK) sebagai Komandan Batalyon Kasuari V, dengan daerah gerilya di A3 (Ayamaru, Aifat dan Aitinyo). Namun dalam gerilya beliau dibunuh di Ayamaru oleh komandan Peleton (anak buahnya) yaitu Martinus Prawar.
- vi. Ex. Polisi Papua, Fred Ajoji (Komandan Batalyon Kasuari VI) dengan daerah Operasi yaitu Kebar, Merdei, Menyambow, dan Manokwari).
- vii. Ex. Angkatan Laut Papua, Daniel Wanma sebagai Komandan Batalyon Kasuari VII. Dengan daera Gerilya yaitu Sausapor, Saukorem, Teminabuan, dan Sorong Kota).

Fakta pergerakan di lapangan memperlihatkan bahwa gerakan OPM terbagi dalam dua kelompok, yaitu (i) Kelompok Separatis Papua (bergerak di bidang politik) dibawah pimpinan Kelly Kwalik dari suku Amungme (telah tertembak mati oleh Aparat Keamanan pada tanggal 16 Desember 2009) dan (ii) Kelompok Separatis Bersenjata dibawah pimpinan Mathias Wenda.<sup>28</sup>

Kelompok OPM dari dahulu sampai saat ini telah mempunyai organisasi bersenjata yang terstruktur. Gerakan organisasi OPM tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah gerakan separatisme, karena telah berbuat makar terhadap Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui beberapa kegiatan yang bersifat terbuka maupun tersembunyi (*klandestine*), baik didalam negeri maupun di luar negeri.

Dari penjelasan diatas, diartikan bahwa penghayatan kehidupan sebagai separatis cukup kental mewarnai generasi pemuda Papua. Sehingga sikap atau pandangan gereja (DGI) yang menyatakan bahwa penanganan masalah Irian Jaya harus ditempatkan pada skala prioritas yang paling tinggi, perlu menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia membutuhkan akan

<sup>28</sup> . Aditjondro, George Junus, 2009, Sejarah OPM, Organisasi papua Merdeka dalam <http://tangisantanag.blogspot.com/2009/05sejarah-opm-organisasi-papa-merdeka.html>.

peran dari para tokoh agama (Kristen/Katholik), dalam membantu penyelesaian masalah Papua untuk mengurangi unsur-unsur separatisme yang bila dibiarkan akan mengancam integritas wilayah NKRI.

#### **4.1.2. Dimensi Sosial Ekonomi dan Politik Papua.**

Penduduk asli Papua termasuk rumpun bangsa Papua-Melanesia yang bermukim di daerah Melanesia. Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2005, jumlah penduduk yang berdiam di Papua mencapai  $\pm$  2,5 juta jiwa. Penduduk Papua bercirikan multi kedaerahan, multi kultural, dan multi suku-bangsa (*plural society*). Propinsi Papua saat ini diberi otonomi khusus (Otsus) dalam wadah dan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dasar dan pertimbangan pemberian Otsus kepada Papua oleh pemerintah yaitu dalam rangka memberikan kesempatan propinsi Papua mengejar ketertinggalan propinsi ini dibanding daerah lain di Indonesia.

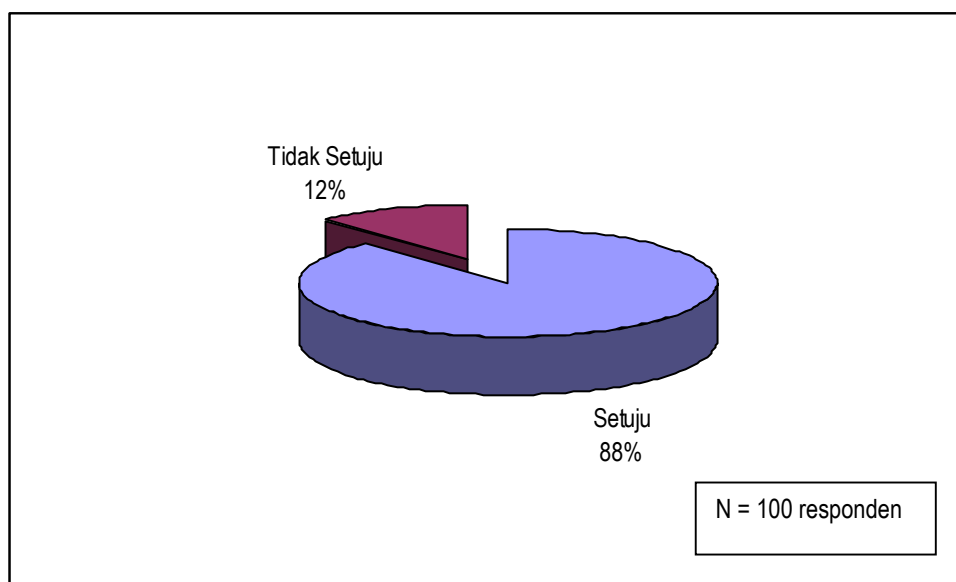
Otsus propinsi Papua diatur dalam UU No. 21 tahun 2001. UU memberikan kewenangan kepada propinsi untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hal-hak dasar masyarakat Papua. Tentu saja konsekwensi bagi pemerintah daerah dan masyarakat di daerah ini untuk merancang suatu paradigma, pendekatan, strategi, kebijakan dan program pembangunan yang mampu memberikan banyak dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat asli. Namun berdasarkan hasil survey bahwa banyak pernyataan atau pandangan yang masih meragukan keberhasilan pelaksanaan Otsus di Papua.

Pelaksanaan UU no.21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi propinsi Papua masih terus membutuhkan perhatian pemerintah pusat, karena dipandang pelaksanaannya belum optimal. Demo dari sekitar 2000 umat Kristiani pada tanggal 4 Agustus 2008 di kota Jayapura, dikoordinir oleh Forum Komunikasi Kristen Indonesia (FKKI) Provinsi Papua, menuntut Pemerintah Papua, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) agar segera membuat Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi). Regulasi-regulasi lokal diharapkan menjadi panduan dalam pemanfaatan dana Otonomi Khusus, dan menyerukan perlunya implementasi otonomi khusus secara

murni dan konsisten.<sup>29</sup> Munculnya demo masyarakat Kristiani Papua tentunya mengandung banyak pertanyaan, bagaimana realisasi pelaksanaan Otsus di lapangan terkait dengan kesejahteraan sosial masyarakat.

Terkait dengan peran dan pengaruh dari tokoh agama, bahwa pergerakan demo yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Kristen Indonesia (FKKI) Provinsi Papua seyogyanya tidak lepas dari kendali Gereja karena secara birokrasi dibawah Dewan Gereja Papua. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang menggerakkan orang lain atau organisasi untuk melakukan sesuatu yang diinginkannya (*leadership is the ability to lead*).

Pada gambar 4.1.2, memperlihatkan bahwa sebagian besar responden (88%) menyatakan setuju bahwa implementasi Otsus Papua belum mencapai sasaran meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Bahkan sebagian responden secara tegas menyatakan bahwa “implementasi Otsus Papua gagal di lapangan Proses pembangunan di tanah Papua terus berlangsung dengan implikasi negatif dan positif terhadap perkembangan hidup masyarakatnya.”



Gambar : 4.1.2  
 Persentase Responden tentang kegagalan Otsus Mencapai Sasaran Meningkatkan Sosial Ekonomi Penduduk Papua

<sup>29</sup> . Wanggai, Velix V, New Deal for Papua, 2009, hal 30

Hasil wawancara mendalam dengan tokoh agama (Pendeta Herman Saud S.Th) menyebutkan pandangannya sebagai berikut bahwa :

*“... Pelaksanaan otsus Papua, identik dengan meningkatnya secara tajam anggaran pembangunan daerah ini. Setiap tahunnya, belasan triliunan rupiah yang didapat daerah ini, dan uang sebanyak itu beredar dalam kehidupan masyarakat luas. Kalaupun hanya sekelompok kecil (baca: penguasa, pejabat, pengusaha dan lainnya) masyarakat yang mampu mendapatkan, mengumpul dan menikmati besarnya kue pembangunan itu, tetapi tetesannya sampai pula pada kalangan masyarakat kebanyakan yang justru hanya sedikit sekali mendapatkan, merasakan dan menikmatinya. Gerakan pembangunan era Otsus memang berbeda dengan pembangunan sebelumnya, sekaligus berdampak kuat pada sifat dan perilaku kehidupan masyarakat. Meningkatnya sosial-ekonomi masyarakat dibarengi ketersediaan barang dan layanan jasa semakin banyak dan bervariasi. Masyarakat luas relatif agak lebih “mudah” mendapatkan uang, menyebabkan aspirasi, keinginan dan kebutuhan masyarakat terhadap barang dan layanan jasa cenderung meningkat.*

(Sumber: Tokoh Agama di Papua)

Banyak faktor yang menjadi penyebab kondisi masyarakat Papua tetap terbelakang sampai sekarang. Penulis berpendapat bahwa cara mengatasi keterbelakangan propinsi Papua adalah dengan mengajak masyarakat untuk mengembangkan budaya lokal sebagai budaya nasional yang mampu mendukung dinamika pembangunan. Budaya lokal yang dimaksud adalah mengatasi kesenjangan dengan menjadi figur-figur masyarakat yang mampu dijadikan contoh yang baik bagi yang lain. Dalam kaitan ini, tokoh agama menyampaikan nilai-nilai ke rohanian (religius) dan mengajak umatnya untuk memahami keberadaan masyarakat dengan mengembangkan sifat toleransi dan kehidupan yang rukun dengan penuh damai terhadap masyarakat pendatang maupun masyarakat nasional secara bersama-sama membangun propinsi Papua.

#### **4.1.3. Dimensi Keamanan di Papua**

Kondisi geografi Negara Kesatuan RI yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil dengan wilayah perairan dan garis pantai yang sangat luas, memiliki tingkat kerawanan yang sangat tinggi dari berbagai bentuk ancaman yang terdiri

dari ancaman tradisional dan non tradisional. Buku putih menguraikan sebagai berikut “ancaman keamanan Non Tradisional dari luar lebih besar kemungkinan bersumber dari kejahatan terorganisir lintas negara yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara, dengan memanfaatkan kondisi dalam negeri yang tidak kondusif. Perkiraan ancaman dan gangguan yang dihadapi Indonesia ke depan, meliputi terorisme, gerakan separatisme, kejahatan lintas negara (penyelundupan, penangkapan ikan ilegal), pencemaran dan perusakan ekosistem, imigrasi gelap, pembajakan/perampokan, aksi radikalisme, konflik komunal, dan dampak bencana alam.<sup>30</sup> Khusus Propinsi Papua adalah termasuk wilayah yang tergolong sering terjadi gangguan keamanan, karena itu dalam aspek keamanan Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus dengan berupaya mengerahkan segala komponen masyarakat untuk mampu memberdayakan wilayah sebagai wilayah pertahanan. Demikian juga karena kondisi geografi yang perbatasan langsung dengan negara PNG, yang notabene secara emosional mempunyai hubungan yang erat, yang berarti rawan akan gangguan keamanan khususnya terkait dengan aktivitas gerakan Separatis Papua. Maka salah satu bentuk perhatian tersebut adalah dengan ditempatkan Satuan-Satuan maupun Satgas dari TNI maupun Polri guna kepentingan pertahanan dan keamanan.

Secara psikologis, pihak-pihak yang berseberangan atau berbeda persepsi mengenai sejarah integrasi Papua ke dalam Negara Indonesia, akan terus melakukan upaya pemisahan. Hal-hal yang dinilai atau dianggap kurang dan tidak mampu mewartakan kebutuhan masyarakat maupun keterkaitannya dengan factor SARA, lingkungan hidup maupun HAM, seperti permasalahan keterbelakangan yang terus terjadi, akan selalu dijadikan isu utama sebagai senjata untuk melakukan tindakan makar atau gerakan pemberontakan melawan Pemerintah Indonesia. Dengan kondisi demikian, berarti stabilitas keamanan di propinsi Papua akan terus terganggu akibat rongrongan oleh gerakan separatis OPM (Organisasi Papua Merdeka).

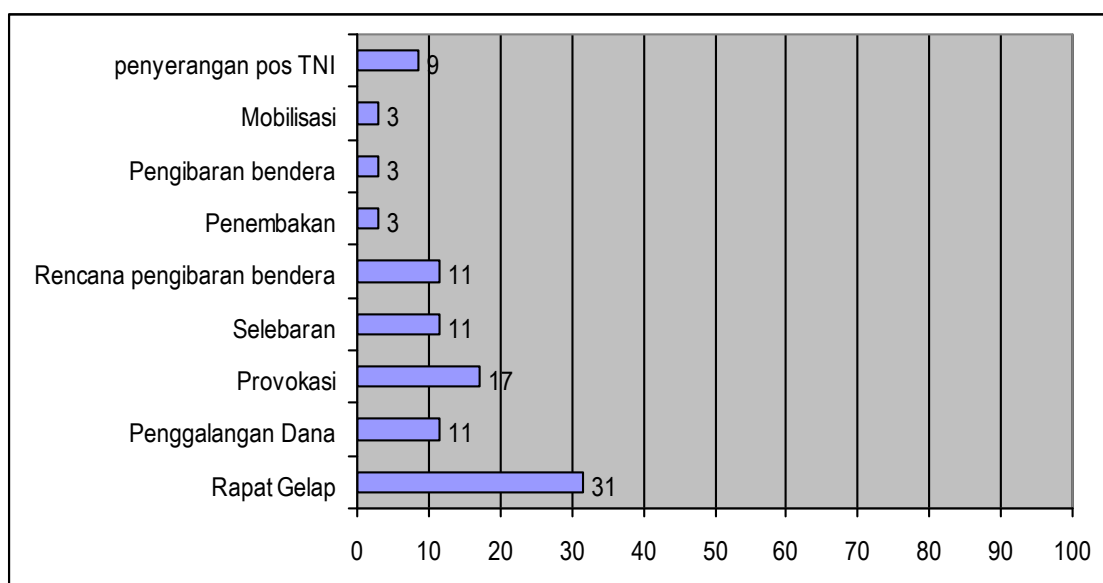
Eskalasi gangguan OPM secara terus menerus menunjukkan peningkatan dalam mengganggu stabilitas keamanan dan keutuhan NKRI. Bentuk gangguan secara politis dilakukan baik di dalam negeri dan di luar negeri. Gangguan keamanan dalam negeri

---

<sup>30</sup>. Departemen Pertahanan, Buku Putih Pertahanan 2008

dibedakan menjadi dua yaitu KSP/P (Kelompok Separatis Papua/ Politik) dan KSP/B (kelompok Separatis Papua/Bersenjata). Kedua bentuk separatis tersebut berdampak terhadap gangguan pertahanan dan keutuhan NKRI. Aktivitas yang dilakukan oleh kelompok separatis Papua adalah sebagai berikut (a) rapat gelap, (b) pengibaran bendera Bintang Kejora, (c) penggalangan dana, (d) selebaran, (e) penembakan (f) penyerangan pos TNI dan lain-lain. Frekwensi gangguan keamanan oleh KSP/P di Papua menunjukkan eskalasi cukup tinggi di berbagai kegiatan. Aktivitas OPM dapat terlihat dari Gambar 4.1.3 yang menunjukkan persentase frekwensi gangguan keamanan oleh KSP/P (Tabel 4.1.3A) dan KSP/B (Tabel 4.1.3B) di propinsi Papua.

Tabel 4.1.3A  
Persentase frekwensi Aktivitas Kelompok Separatis Papua (KSP/P)  
Tahun 2007-2008

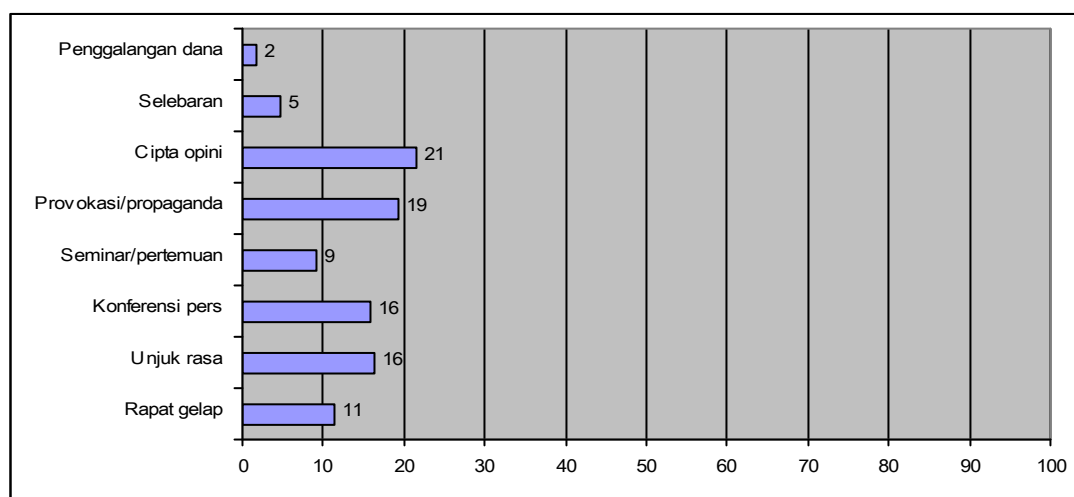


Sumber: Badan Intelijen Strategis TNI, Catatan : Gangguan keamanan oleh KSP/P berjumlah 36 kasus.

Hasil data tersebut menunjukkan bahwa aktivitas separatis yang terbesar dilakukan dalam bentuk rapat gelap (30%) dan kegiatan provokasi KSP/P terlihat cukup tinggi sejumlah 17%. Ke dua kegiatan tersebut (rapat gelap dan provokasi) adalah kegiatan di bawah tanah. Atas dasar uraian data tersebut, maka peran masyarakat dan tokoh agama akan berfungsi meredam secara dini aktivitas kelompok separatis tersebut.

Aktivitas KSP/P yang bersifat tindakan nyata relatif kecil namun mempunyai dampak psikologi besar kepada ketenangan dan keamanan masyarakat Papua, seperti penyerangan pos polisi (9%) dan pengibaran bendera bintang kejora dan penembakan (3%). Meski sifat gangguan keamanan berupa aktivitas fisik ini relatif kecil namun harus ada upaya penanganan pihak TNI dan POLRI agar bertindak tegas secara represif, agar ada efek jera kepada KSP yang coba-coba mengganggu keamanan.

Tabel 4.1.3 B  
Frekwensi Aktivitas Kelompok Separatis Papua (KSP/B)  
Tahun 2007-2008



Sumber: Badan Intelijen Strategis INI, Catatan : Gangguan keamanan oleh KSP/B berjumlah 228 kasus.

Data statistik memperlihatkan pola aktivitas yang tidak berbeda dilakukan oleh kelompok separatis Papua/bersenjata (KSP/B). Aktivitas KSP/B dalam melakukan gangguan keamanan jauh lebih banyak dibanding kelompok separatis Papua/Politik (KSP/P). Menurut hemat penulis bahwa fakta tersebut menunjukkan pada periode yang sama gangguan keamanan yang dilakukan oleh KSP/B dan frekwensi gangguan aktivitas kelompok KSP/P tidak berkurang dalam melakukan aktivitas gangguan keamanan yang rawan terhadap keutuhan NKRI.

#### 4.1.4. Dimensi Pengaruh Asing.

Permasalahan lain yang mendorong tumbuhnya separatisme di Papua adalah adanya campur tangan asing. Pihak asing diduga mempunyai kepentingan terhadap adanya konflik internal di Papua. Dugaan seperti diutarakan Tengku Muhammad Hamzah Thayeb (Duta Besar Indonesia untuk Australia) ketika rapat dengar pendapat dengan DPR yang dipublikasikan oleh Jawa Post tanggal 19 April 2006.<sup>31</sup> Ia menyatakan adanya dukungan berbagai kelompok LSM maupun senator di Australia kepada kelompok gerakan separatis di Papua. Berbagai kampanye Papua merdeka kerap difasilitasi oleh kelompok-kelompok tersebut. Berdasarkan hasil perbincangan dan dialog dengan berbagai kelompok di Australia, memang ada keterkaitan antara gerakan separatis di Papua dan Persekutuan Gereja Australia (Uniting Church in Australia). Mereka memanfaatkan jaringan gereja dalam kampanye pro kemerdekaan Papua.

Bukti lain adanya keterlibatan tokoh-tokoh Australia dalam gerakan separatis Papua. Misalnya, berbagai tokoh asing seperti Natasha Despoja (Partai Demokrat), Bob Brown (Green Party), dan Greg Sword (Partai Buruh) sering dikaitkan dengan separatis OPM di Papua. Fakta tersebut dikuatkan oleh Laode Ida (Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Australia mengatakan bahwa berdasar pengamatannya, memang tidak sedikit jaringan LSM maupun gereja di Australia yang ikut memperjuangkan Papua merdeka. Laode yang sudah menemui senator Australia dari Partai Hijau yang paling vokal dalam mendukung Papua merdeka Kerry Nettle menjelaskan, ada skenario global yang ikut mengipas-ngipasi agar Papua merdeka<sup>32</sup>. Kebijakan negara Australia terhadap permasalahan Papua sepertinya mendua disinyalir karena adanya faktor-faktor kepentingan, sehingga mendorong hubungan kedua negara menjadi pasang surut akibat permasalahan Papua.

Permasalahan Papua telah menjadi agenda Senat Amerika. Kongres Amerika Serikat tertanggal 14 Pebruari 2008 menyampaikan surat kepada Sekjen PBB Ban Ki-Moon, yang melaporkan tentang hasil kunjungan wakil khusus

<sup>31</sup> . [http://www.indonesia-ottawa.org/information/details.php?type=news\\_copy&id=2454](http://www.indonesia-ottawa.org/information/details.php?type=news_copy&id=2454), diakses tanggal 18 Juli 2010, jam 11.44

<sup>32</sup>. <http://www.opensubscriber.com/message/ppiindia@yahoogroups.com/3833936.html>, diakses tanggal 25 Nopember 2009

Sekjen PBB Ms Hina Jilani saat berkunjung ke Papua Barat pada tanggal 5 s/d 12 Juni 2007 menilai adanya pelecehan dan pelanggaran HAM di Papua

Beberapa bukti tersebut diatas menunjukkan bahwa telah terjadi konspirasi dari negara / organisasi asing terhadap masalah Papua yang merupakan masalah internal Indonesia. Dengan demikian diperlukan upaya counter dengan mengedepankan jalur diplomasi sebagai kunci utama penyelesaian konflik.

#### **4.2. Upaya Menangkal Gerakan Separatis**

Dalam urusan penyelesaian konflik separatis Papua, Pemerintah membutuhkan upaya komprehensif dengan melibatkan seluruh komponen. Pemberian Otonomi Khusus Papua ternyata belum mampu meredam keinginan sekelompok masyarakat yang memperjuangkan kemerdekaan Papua. Kelompok Separatis berupaya menarik simpati internasional dengan cara melakukan berbagai kegiatan. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat sistem intelijen dan diplomasi luar negeri, sebagai upaya meng-counter aktivitas propaganda negatif OPM di luar negeri, dan menutup jaring komunikasinya.

##### **4.2.1. Upaya Preventif Pemerintah Pusat**

Mahatma Gandhi menyatakan bahwa *Siasat tanpa kekerasan menjadi senjata hebat untuk perubahan sosial*<sup>33</sup>. Berpijak dari pernyataan tersebut, penulis mencoba mengkaitkan strategi yang pantas dan cocok dalam penanganan permasalahan yang ada di Papua, khususnya menyangkut eksistensi gerakan separatis atau kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang sampai saat ini masih melakukan rongrongan terhadap kedaulatan NKRI. Sebetulnya apa yang diinginkan kelompok tersebut?, Merdeka yang bagaimana yang mereka inginkan?, pendapat ini nampaknya juga belum seirama. Bagi kelompok politisi OPM tentunya merdeka berarti melepaskan diri dari kedaulatan NKRI karena demi mempertahankan ideologinya. Hal tersebut tergambar dalam pernyataan

---

<sup>33</sup>. 33 Strategi Perang, Hal 15, kata pengantar, Robert Greene,

Yacob Rombiyak yang menyatakan bahwa *Suasana politik masih didominasi oleh hubungan yang tidak sehat antara nasionalis Indonesia yang menonjolkan "NKRI sebagai harga mati" dan kelompok nasionalis Papua yang juga menekankan "Papua Merdeka sebagai harga mati"*<sup>34</sup>. Sedangkan disisi lain bagi masyarakat kebanyakan berpendapat bahwa merdeka berarti menginginkan kehidupan yang layak dan sejajar dengan Propinsi atau suku lainnya di Indonesia.

Dua pelaku dominan dalam konflik yaitu dari pihak Nasionalis Indonesia dan Nasionalis Papua. Pelaku dari Pemerintah Indonesia (Nasionalis Indonesia), antara lain Depdagri, Badan Intelijen Negara (BIN), Desk Papua Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan badan negara lainnya. Sedangkan dari kalangan nasionalis Papua terdapat berbagai jenis kelompok yang menyebut diri Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM), lalu Presidium Dewan Papua (PDP) dan panel-panelnya, serta kelompok nasionalis Papua lainnya yang tersebar di dalam dan di luar negeri. Di antara dua kutub itu terdapat Dewan Adat Papua (DAP), lembaga keagamaan (Gereja Katolik dan Protestan, dan lembaga keagamaan lainnya), LSM, partai politik, organisasi kemasyarakatan (Ormas), serta kelompok berbasis suku-suku di Papua.

Pemerintah pusat dalam merespons sepak terjang gerakan dan aktivitas pelanggaran yang dilakukan gerakan separatis, baik penyerangan, penembakan, tuntutan demo, maupun tindakan lain yang dinilai merupakan tindakan makar, telah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangannya, dengan meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar lembaga pemerintah, yang melibatkan peran Institusi atau Kementerian terkait seperti: Pemerintah Daerah (Kesbang Pollinmas), Depdikbud, Depsos, Deplu, Kejaksaan, Imigrasi, Kepolisian, TNI ataupun BIN dan lainnya termasuk sektor Media. Upaya ini nampaknya belum mampu mensyurutkan perjuangan kelompok separatis Papua.

Dalam doktrin pertahanan Negara menjelaskan bahwa perang rakyat semesta adalah perang total seluruh rakyat Indonesia dengan mengerahkan

---

<sup>34</sup>. Papua Road Map, Muridan S Widjoyo, Pengantar xx

segenap kekuatan dan sumber daya nasional untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari bangsa lain yang mengancam atau menduduki wilayah NKRI.<sup>35</sup> Dengan demikian bahwa menangani permasalahan dengan kelompok separatis Papua, khususnya kelompok Separatis Bersenjata, apakah dapat juga disebut sebagai upaya perang berlanjut dengan kelompok OPM.

Secara nyata maupun terselubung, setiap gerakan perjuangan kelompok separatis Papua bertujuan ingin merdeka dan melepaskan bangsa Papua dari NKRI, baik melalui perjuangan bersenjata maupun melalui jalur politik. Namun dengan adanya referensi perjuangan dari negara-negara lain yang lepas dari negara induknya, nampaknya keinginan untuk melakukan komunikasi dengan pusat dengan cara dialog ataupun cara-cara demokratis untuk mendapatkan pengakuan semakin kuat. Selanjutnya, Kelompok separatis (OPM) menghalalkan penyerangan-penyerangan dan teknik gerilya terhadap sasaran pos-pos TNI terpencil.

Penulis beranggapan bahwa dalam upaya penyelesaian kelompok separatis di di Papua, tentunya harus diketahui penyebab kenapa timbulnya gerakan. Faktor kultur budaya sering menjadi alasan utama kelompok separatis untuk memisahkan dari NKRI. Selanjutnya, upaya KSP/P ataupun KSP/B berdampak terhadap mencuatnya berbagai kejadian atau konflik yang muncul begitu saja. Konflik kepentingan kelompok OPM dengan pemerintah, akibat gesekan yang terjadi antara kedua kubu baik dari Pemerintah maupun dari kelompok separatis. Atau lebih yang disebabkan adanya perbedaan nilai, status, kekuasaan, kelangkaan sumber daya, serta distribusi yang tidak merata di wilayah Papua,

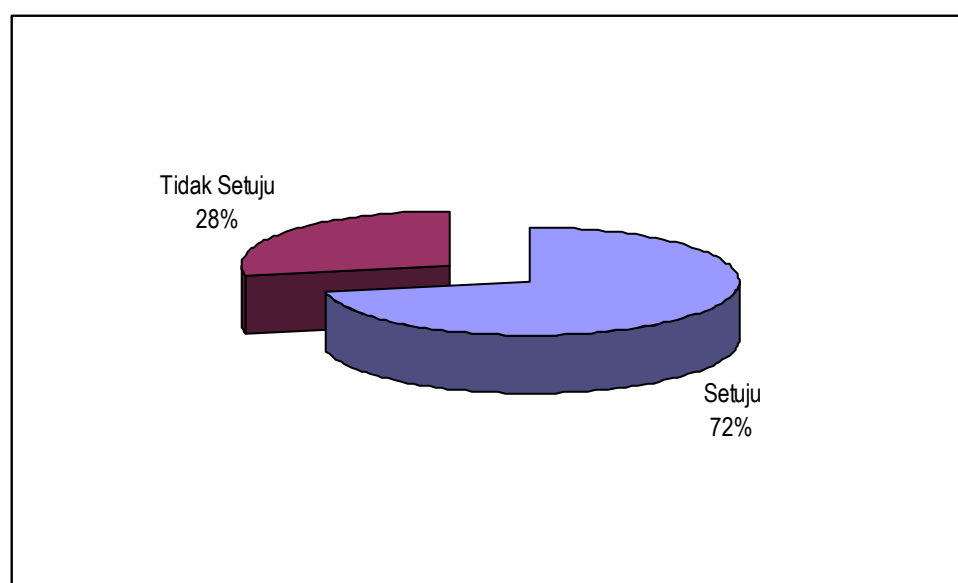
Hasil observasi dan wawancara mendalam dengan masyarakat maupun tokoh agama menunjukkan bahwa perbandingan keinginan masyarakat untuk melakukan upaya dialog dengan pemerintah pusat adalah lebih kuat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, penulis sependapat dengan hasil kajian Bapenas yaitu perlunya diambil beberapa langkah kebijakan antara lain : (i) Diperlukan upaya peningkatan koordinasi dan kerja sama interdep atau antar lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan separtisme; (ii) peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan sumber

---

<sup>35</sup> . Lertjen TNI JS Prabowo, Perang Semesta, hal 43

daya ekonomi masyarakat lokal tanpa adanya diskriminasi; (iii) pelaksanaan pendidikan politik dan bela negara secara formal dan informal, dalam rangka meningkatkan rasa saling percaya dan menumbuhkan kecintaan terhadap NKRI; (iv) peningkatan peran diplomasi di dalam dan di luar negeri melalui Kedutaan Besar RI dalam rangka kontra diplomasi OPM; dan (v) pengefektifan upaya deteksi secara dini (*early warning system*) dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme dengan mengedepankan peran tokoh agama sebagai ujung tombak komunikasi langsung dengan masyarakat grass root.

Hasil data yang dikumpulkan terhadap mahasiswa menunjukkan adanya keinginan menyelesaikan separatis dengan cara-cara dialogis seperti terlihat dalam gambar 4.2.1 di bawah ini.



Gambar 4.2.1  
Persentase pendapat responden terhadap pencegahan gerakan separatis Papua melalui pendekatan Dialogis

Hasil data menunjukkan bahwa sejumlah 72% responden menyatakan setuju bahwa penyelesaian dan pencegahan terhadap berkembangnya gerakan separatis Papua dilakukan dengan cara-cara dialogis. Selebihnya (28%) responden menyatakan ketidaksetujuan dengan cara-cara dialogis dalam menyelesaikan

separatis Papua. Alasan yang dikemukakan sebagian responden adalah akan merasa kesulitan dalam mengawasi keberlangsungan cara pendekatan dialogis. Disisi lain, cara dialog juga sering terjadi *dead lock* karena tidak adanya kesamaan pandangan dari faksi-faksi yang terlibat, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa dialog yang telah terjalin terkadang akan diingkari secara sepihak. Dengan kondisi demikian, tidak jarang akan terjadi sempalan-sempalan dari kelompok separatis yang ingin mengembangkan kelompoknya tersendiri dengan tuntutan-tuntutan tersendiri pula.

Seperti diungkapkan informan yang menjadi narasumber penelitian (Daniel Harmadi) menyebutkan sebagai berikut:

*“Yang diinginkan oleh rakyat Papua adalah kesetaraan dan keberpihakan terhadap mereka, sudah bertahun-tahun lamanya mereka diajak dialog tentang Papua, namun setelah dialog tidak ada realisasi sehingga timbul rasa frustrasi dan ketidakpercayaan terhadap pembicaraan maupun segala sesuatu yang masih berupa wacana”.*

Dari uraian tokoh agama tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa mekanisme dialog dalam menyelesaikan masalah kelompok separatis telah sering dilakukan namun masih belum menunjukkan hasil karena kurangnya melibatkan pihak tokoh agama. Menurut hemat penulis keterlibatan tokoh panutan seperti Pedeta atau Romo akan mampu memberikan kontribusi hasil dialog yang lebih nyata pada masyarakat Papua.

Sebaliknya apabila pelaksanaan dialog dengan menggunakan jasa negara atau organisasi asing, perlu menjadi bahan pertimbangan dan instropeksi karena berdasarkan dari pengalaman konflik Timtim dan dengan GAM di Aceh. Yang jelas bahwa negara atau LSM asing yang diminta untuk dijadikan sebagai fasilitator dialog dalam kasus Papua, ada kemungkinan besar akan mencari beberapa kelemahan-kelemahan untuk memojokan kebijakan Pemri, antara lain seperti : minimnya pembangunan SDM akibat dari jarak jangkauan wilayah, kurangnya kepedulian birokrasi, keterbatasan Infrastruktur, keterbelakangan pendidikan maupun tentang pelayanan kesehatan masih rendah. Demikian juga menyangkut kehidupan sosial, seperti masalah kemiskinan, pengangguran terus

meningkat, faktor SARA, adanya sikap memandang rendah terhadap suku Papua, serta kemungkinan besar menyangkut masalah kebijakan birokrasi di Indonesia.

Untuk itu perlu dikaji kembali bahwa penyelesaian dengan menggunakan cara dialog, Pemerintah Indonesia harus secara tegas dan extra hati-hati jangan sampai terulang menjadi seperti Timtim kedua, harus tetap dipagari dalam bingkai NKRI.

#### **4.2.2. Upaya Preventif TNI dalam Penyelesaian Konflik**

Secara tradisional, tentara adalah salah satu kekuatan nasional negara ( *Instrument of national power* ), disiapkan untuk menghadapi ancaman yang berbentuk kekuatan militer. Sesuai dengan tugas pokok, TNI melaksanakan Operasi Militer Perang ( OMP ) yaitu Operasi militer dalam menghadapi kekuatan militer negara lawan, baik berupa invasi, agresi, maupun infiltrasi, dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yaitu Operasi militer yang dilaksanakan bukan dalam rangka perang dengan negara lain, tetapi untuk tugas - tugas lain seperti melawan pemberontakan bersenjata gerakan separatis ( counter insurgency ) tugas mengatasi kejahatan lintas negara, tugas bantuan, tugas kemanusiaan, dan tugas perdamaian. Kekuatan TNI di seluruh wilayah kedaulatan NKRI berfungsi sebagai penyangga dan penindak awal terhadap setiap ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri.

Demikian juga menghadapi gerakan separatis Papua yang terorganisasi, yang bertujuan menggulingkan atau melepaskan diri dari pemerintahan yang sah dengan menggunakan cara subversi atau konflik dengan menggunakan kekuatan senjata, TNI mempunyai andil besar dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah. Yang pasti adanya konflik bersenjata antara kelompok separatis dengan Pemerintah dalam hal ini TNI, masyarakatlah akan selalu menjadi korban dari aksi pergerakannya. Melihat kondisi demikian, TNI beserta komponen lainnya pastinya akan mengeluarkan kebijakan dalam mengurangi aktivitasnya, dimana suka atau tidak suka upaya militer ditempuh dalam upaya mengatasi gerakan separatis yang nyata-nyata membahayakan keutuhan negara.

Dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka penggunaan kekuatan militer menjadi suatu hal yang

sah dan dibenarkan oleh Undang Undang. Namun demikian yang menjadi persoalannya adalah, bagaimana konsep penggunaan kekuatan bersenjata tersebut dalam pelaksanaan di lapangan sehingga tidak menimbulkan ekses hukum dan pelanggaran HAM bagi prajurit. Perlu disadari apabila mencermati aktivitas kaum insurjen dalam menjalankan aksinya, dewasa ini lebih banyak beroperasi di lingkungan pemukiman daripada di hutan-hutan seperti dahulu, sehingga kemungkinan timbulnya korban warga sipil dalam pelaksanaan operasi militer menjadi sangat mungkin.

Sun Tzu menyatakan bahwa “Menaklukkan suatu daerah tanpa peperangan”. Demikian juga dikatakan ” Cita-cita meraih kemenangan tanpa pertumpahan darah, dengan memanfaatkan kelemahan psikologis lawan, dengan memaanuver lawan ke dalam posisi-posisi berbahaya, dengan memancing perasaan frustrasi dan bingung, seorang ahli strategi mungkin menjadikan lawannya jatuh secara mental sebelum menyerah secara fisik<sup>36</sup>. Maka secara umum upaya penanggulangan gerakan harus diarahkan pada segenap bidang kehidupan masyarakat, akan tetapi harus disadari bahwa penyelesaian konflik akhirnya akan sangat tergantung pada pendekatan politik maupun militer. Pendekatan politik dan kekuatan militer menjadi kekuatan penentu karena pada prinsipnya harus mampu diperebutkan adalah “hati” atau “simpati” rakyat.

Yang menjadi persoalan bahwa masyarakat masih trauma terhadap pendekatan keamanan yang dilaksanakan oleh militer dalam melakukan operasi melawan gerakan separatis, hasil data yang dikumpulkan penulis memperlihatkan adanya trauma tersebut. Ada banyak responden (67%) yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pendekatan keamanan dalam menekan gerakan Papua. Namun sebagian kecil (33%) responden mahasiswa tersebut masih dapat memahami akan adanya operasi militer karena operasi keamanan masih diperlukan dalam menjaga kedaulatan NKRI. Seorang informan yang diminta pendapatnya terhadap operasi keamanan yang dilakukan antar TNI/Polri menyatakan sebagai berikut:

*“TNI/Polri memiliki hubungan yang harmonis dengan masyarakat, komunikasi yang dilakukan kedua institusi ini sudah tepat sasaran namun harus terus dipantau agar tidak*

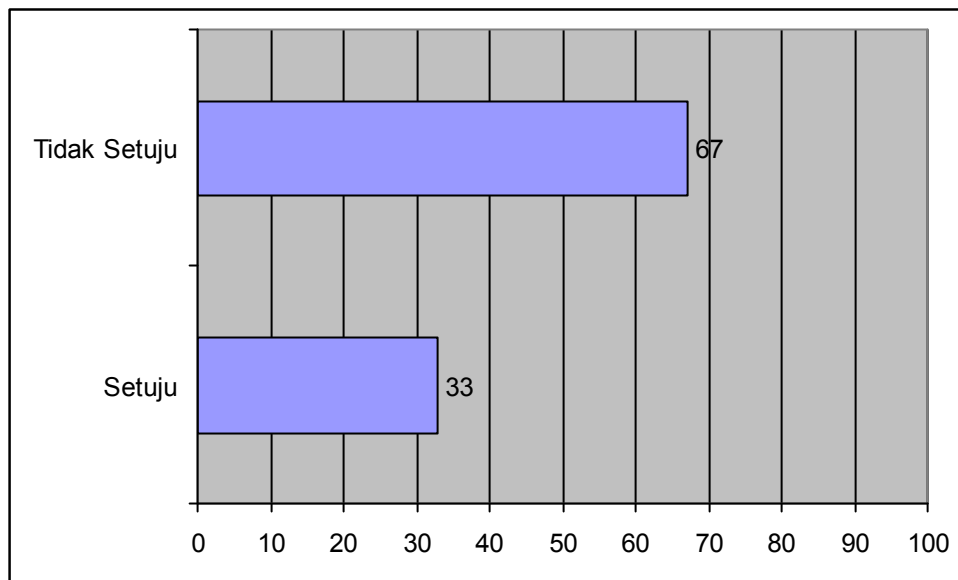
---

<sup>36</sup>. Robert Greene, 2007, ”33 Strategi Perang”,, hal 14

*mudah ternoda dengan kelakuan oknum TNI / Polri yang dapat merusak citra TNI / Polri”*

Hasil data yang dikumpulkan terhadap mahasiswa dan masyarakat, menunjukkan bahwa pendekatan keamanan menghadapi kelompok separatis Papua dengan mengedepankan militer sebagai ujung tombak tidak mendapat sambutan dari masyarakat setempat. Hal tersebut terlihat dalam gambar 4.2.2 di bawah ini.

Tabel 4.2.2  
Persentase responden terhadap pendekatan keamanan dalam Mengatasi Kelompok Separatis Papua (OPM)



Penulis beranggapan bahwa peran TNI beserta komponen lainnya akan mengemban amanah dan kebijakan dalam mengurangi aktivitas kelompok separatis yang merongrong NKRI. Kondisi tersebut memaksa aparat keamanan untuk bertindak (dimana suka atau tidak suka) upaya militer ditempuh dalam upaya mengatasi gerakan separatis yang nyata-nyata membahayakan keutuhan negara.

### 4.2.3. Keterlibatan Tokoh Agama Dalam Menangkal Gerakan Separatis Papua

Dalam Konstitusi UUD 45, menyatakan bahwa Pemerintah dalam melaksanakan tugas memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya. Tugas tersebut merupakan bagian integral dalam membantu pemerintah untuk menjawab pengaruh lingkungan operasi dengan menggunakan pendekatan pertahanan semesta. Pernyataan ini secara jelas menyatakan adanya keterlibatan seluruh komponen kekuatan, akan sangat menentukan keberhasilan wilayah dalam menghadapi segala tantangan, hambatan, maupun ancaman yang datang. Demikian pula sangat jelas bahwa tugas tersebut dalam upaya menghadapi skenario dan strategi negara lain yang ingin memecah belah dan menghancurkan bangsa Indonesia melalui perannya secara tidak langsung. TNI yang merupakan salah satu pilar dan kekuatan NKRI, tentunya akan selalu menjadi target untuk dijatuhkan dan dihancurkan citranya dihadapan publik domestik maupun internasional. TNI memandang bahwa upaya mempertahankan kedaulatan negara, dapat dilakukan baik secara berdiri sendiri maupun bersama-sama dengan unsur masyarakat, membantu pemerintah dalam menyiapkan kekuatan pertahanan. Dalam hal ini terwujudnya kebersamaan dan kemandirian TNI-Rakyat akan merupakan elemen kekuatan pertahanan negara yang menjadi sangat perlu untuk dipertahankan.

Faktor primordialisme dan semangat kesukuan/kebangsaan dalam banyak kasus turut mendorong munculnya gerakan separatisme. Karena itu, peran tokoh-tokoh agama yang mempunyai pengaruh kuat dalam mencegah timbulnya gerakan separatis dalam masyarakat akan sangat membantu peran komando wilayah TNI dalam membina stabilitas wilayah.

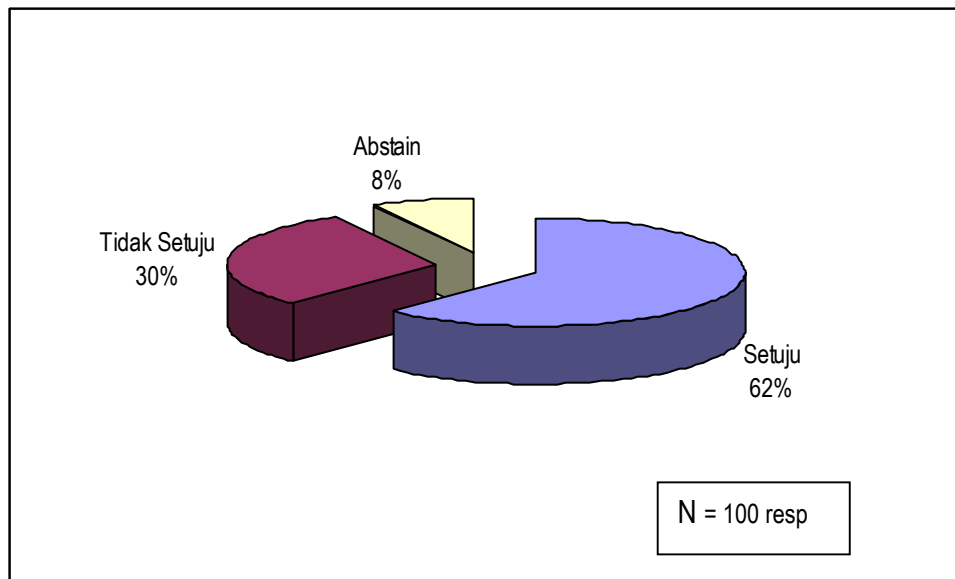
Pada dasarnya sebagaimana disampaikan oleh Pastor Agus Ulahaiyan, Pr,<sup>37</sup> bahwa peran tokoh agama sangat penting dalam masyarakat. Selaku Mediator Perdamaian (*Peace – Maker*), beberapa alasan mendasar yang menjadikan bahwa seorang tokoh Agama dapat berperan dalam memediasi permasalahan, sebagai berikut:

---

<sup>37</sup>.<http://stpakambon.wordpress.com/peran-tokoh-agama-dalam-mengantisipasi-dan-penanganan-konflik-di-maluku/>diakses tanggal 10 Juli 2010, jam 22.09

- (i) Punya keprihatinan yang tulus dan mendalam atas situasi yang ada.
- (ii) Memiliki kesadaran dan rasa tanggungjawab yang tinggi, turut mengambil tanggungjawab, walaupun bukan merupakan penyebab/sumber konflik).
- (iii) Sebagai Informan : mencari dan menyalurkan informasi secara cepat, tepat, jelas, lengkap, terpercaya, tak berpihak, dan obyektif.
- (iv) Sebagai Komunikator : mewartakan dan mengupayakan kesadaran dan penegakan nilai-nilai kemanusiaan, martabat dan hak asasi manusia, tata tertib atau aturan hidup bersama (hukum) serta keutamaan-keutamaan seperti keadilan, kebenaran, kejujuran dan cinta kasih.
- (v) Sebagai Stabilisator / harmonisator : menjadi penyelaras, pengimbang, penyejuk, dengan tetap menjaga netralitas, memperjuangkan kebaikan umum untuk semua pihak.
- (vi) Sebagai Motivator / inspirator : memberi pencerahan, jalan, semangat dan penguatan bagi semua pihak untuk tetap berjuang demi perdamaian dan kebaikan umum.
- (vii) Sebagai Fasilitator / moderator : memfasilitasi dan mengawal pelbagai aktivitas untuk perdamaian dan kebaikan umum.
- (viii) Sebagai Transformator : memprakarsai perubahan, pemulihan, perbaikan dan peningkatan dengan memberi koreksi atas kesalahan atau keburukan serta pengukuhan atau peneguhan atas kebaikan dan kebenaran. Terutama berusaha menjadi contoh bagi atau sebagai pembawa (agen) perdamaian dan pembaharuan atau perubahan serta persatuan dan kesatuan, dengan tetap berpegang pada keyakinan bahwa Allah-lah Pelaku Utama.

Pengetahuan responden terhadap peran tokoh agama dalam memberi pengetahuan terhadap masyarakat untuk mengatasi separatis Papua terlihat pada gambar 4.2.3.



Gambar 4.2.3  
Pengaruh Tokoh Agama Mampu Mendekati Kelompok Separatis Papua (OPM)

Hasil data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa sebagian besar responden (62%) menyatakan setuju bahwa tokoh agama berperan besar mencegah berkembangnya gerakan separatis di Papua. Namun, terdapat 30% responden yang tidak berkenan bahwa tokoh agama (pendeta atau Romo) dapat memainkan dalam pencegahan separatis di Papua. Karena berbagai alasan bahwa tujuan separatis adalah ingin memisahkan dari NKRI, dan atas dasar historis bahwa Belanda telah jauh lama mempersiapkan kemerdekaan bangsa Papua.

Tokoh pemerintahan di Papua Bapak Alex Hasegem, SE (wakil Gubernur Papua) mengemukakan gagasannya sebagai berikut :

*“Tokoh agama akan mudah diterima diberbagai kalangan di Papua sehingga sering kali menjadi kajian mediator dalam setiap konflik, namun tingkat keberhasilannya tergantung dari masyarakat itu sendiri dan keinginan masyarakat untuk mewujudkan kedamaian di wilayahnya“.*

Penulis menduga bahwa dengan kondisi masyarakat Papua yang religius maka tokoh Agama (Pendeta dan Romo) sangat berpotensi berpengaruh dalam kehidupan masyarakat termasuk kelompok separatis. Pada dasarnya, Gereja Katolik tetap melihat politik sebagai sesuatu yang pada hakekatnya adalah baik, mutlak perlu bagi manusia, berpijak pada kemanusiaan untuk kebaikan umum (*bonum commune*). Maka menghadapi kenyataan politik yang tidak sesuai dengan

hakekatnya, Gereja Katolik mengajak semua pihak untuk kembali kepada visi dan misi politik yang sebenarnya. Karena itu Gereja Katolik memperjuangkan pembaharuan politik dengan menekankan :

- Perubahan politik citra dan politik uang menjadi politik kompetensi dan pengabdian.
- Perubahan politik sektarian dan primordialis menjadi politik yang terbuka dan pluralistik.
- Perubahan dari “politik top down” menjadi “politik bottom up”.
- Perubahan dari politik struktural autoritatif menjadi politik konstitusional fungsional dan demokratis.

#### **4.2.3.1. Persepsi Tokoh Agama Kristen/Katholik Mengenai Isu Separatis Papua**

Pengamat politik Papua sekaligus penulis buku "*Makar-Perspektif Papua*", Frits Bernard Ramandey SSos MH, pada tanggal 6 Mei 2010, di Jayapura menyatakan bahwa Lembaga-lembaga keagamaan merupakan salah satu saluran yang bisa menjembatani proses dialog masyarakat Papua dengan Jakarta, dalam rangka menghapuskan tuduhan makar atas oknum atau kelompok masyarakat tertentu yang melakukan aksi sosial. Hal tersebut disampaikan, menanggapi desakan banyak kalangan masyarakat di Papua agar segera digelar dialog nasional Papua dengan pemerintah pusat untuk menuntaskan berbagai permasalahan krusial di wilayah Papua. "Pendekatan spiritualitas agama mengajarkan bahwa kedudukan manusia adalah sederajat." Dikatakan bahwa, Gereja Katolik dan Protestan di Papua selama ini telah menjalankan misi dengan baik dalam menjembatani proses awal komunikasi masyarakat Papua dengan pemerintah Indonesia. Para tokoh agama di Papua mengambil peran penting dalam memediasi dialog sebagai jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan status politik Papua secara bermartabat berdasarkan nilai-nilai ajaran ke-Tuhanan yang bebas kepentingan pragmatisme.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>.Ant,[http://bintangpapua.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4534:lembaga-agama-mediati-dialog-papua-jakarta&catid=3:kab-jayapura&Itemid=88](http://bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4534:lembaga-agama-mediati-dialog-papua-jakarta&catid=3:kab-jayapura&Itemid=88), diakses tanggal 23 Januari 2010, jam 23.40

Dari sudut kepemimpinan, contoh pengalaman gereja di Timor Timur (sekarang negara Timorleste) pada waktu sebelum lepas dari wilayah kedaulatan NKRI dibawah Uskup Belo dapat menjadi bahan pertimbangan. Peran ketokohan sebagai pemimpin gereja mampu mempengaruhi masyarakat Timor Timur dan menumbuhkan sikap oposisi masyarakat daerah terhadap pusat. Untuk itu perlu merefleksi kembali bagaimana pengalaman pemerintah Indonesia pada saat itu menghadapi gereja-gereja di Timor Timur yang telah dimanfaatkan oleh para elit politik untuk mempengaruhi massanya. “Hanya lima bulan setelah pentahbisannya, dalam sebuah misa di Katedral Dili, dengan berapi-api Uskup Belo melakukan protes menentang penangkapan dan kekerasan yang menjadi ciri Operasi Persatuan. Belo tetap berkunjung ke kantong Oecusse bulan Januari 1984 meskipun ada protes kuat dari militer. Ia mengirimkan kritik detailnya atas penindasan militer selama Operasi Persatuan ke Lisabon dan berpengaruh pada hirarki gerejaKatholik Portugis.<sup>39</sup>

Contoh ini menggambarkan bagaimana peran Uskup Belo, khususnya Gereja di Timor Timur dalam membantu kelompok anti NKRI melawan Pemerintah Indonesia dengan mempengaruhi dan menggunakan jalur hirarki Gereja. Dalam kaitannya terhadap kasus yang berurusan dengan separatistis di Papua, unsur peran dan kepemimpinan dari tokoh agama menjadi bagian yang harus dipertimbangkan dan sangat penting dalam membantu mengurangi konflik.

#### **4.2.2.2 Peran Tokoh Agama Kristen/Katholik Dalam Mencegah Isu Separatistis Papua.**

Unsur pertahanan dan keamanan menjadi sangat penting dalam mengatasi konflik yang terjadi di masyarakat, meskipun disadari bahwa untuk melaksanakan fungsi pertahanan dan keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat negara namun melainkan segenap komponen bangsa diantaranya tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Keagamaan merupakan salah satu aspek penting bagi kehidupan masyarakat di Papua, dan Tokoh agama memiliki peran strategis sebagai agen

---

<sup>39</sup> . Taylor, John G, tahun 1998, *Perang Tersembunyi, Sejarah Timor Timur yang terlupakan*, hal 275.

perubahan sosial. Oleh karena itu para pemuka agama dituntut lebih memantapkan kembali etika kehidupan yang religius dan bermartabat di tengah-tengah tantangan kehidupan masyarakat Papua. Menurut Wakil Gubernur Propinsi Papua berpendapat bahwa

*”... peran tokoh agama harus dimaksimalkan, karena para tokoh agama ini memiliki ikatan emosional yang kuat dengan umat. Para tokoh agama akan sangat didengar ucapannya. Untuk itu para tokoh agama harus dilibatkan secara aktif dalam persoalan yang muncul di masyarakat termasuk di dalamnya dalam menanggulangi separatis OPM di Papua.*

Tokoh agama memiliki peran cukup besar dalam berbagai bidang sosial, dapat dilihat dari fungsi agama dalam bidang politik, ekonomi maupun dalam kehidupan masyarakat umum. Pendeta Herman saud S.Th. (tokoh agama Kristen) yang mengemukakan bahwa peran yang harus dilakukan terhadap kerukunan dan persatuan adalah sebagai berikut :

- (i) Pertemuan untuk penyelesaian masalah secara dialogis;
- (ii) Penyelarasan dengan mengutamakan kesamaan;
- (iii) (Penyatuan dengan tetap menghargai dan menjamin perbedaan/kekhasan);
- (iv) Pemulihan keadaan; dan
- (v) Pembaharuan untuk hidup bersama yang lebih baik.

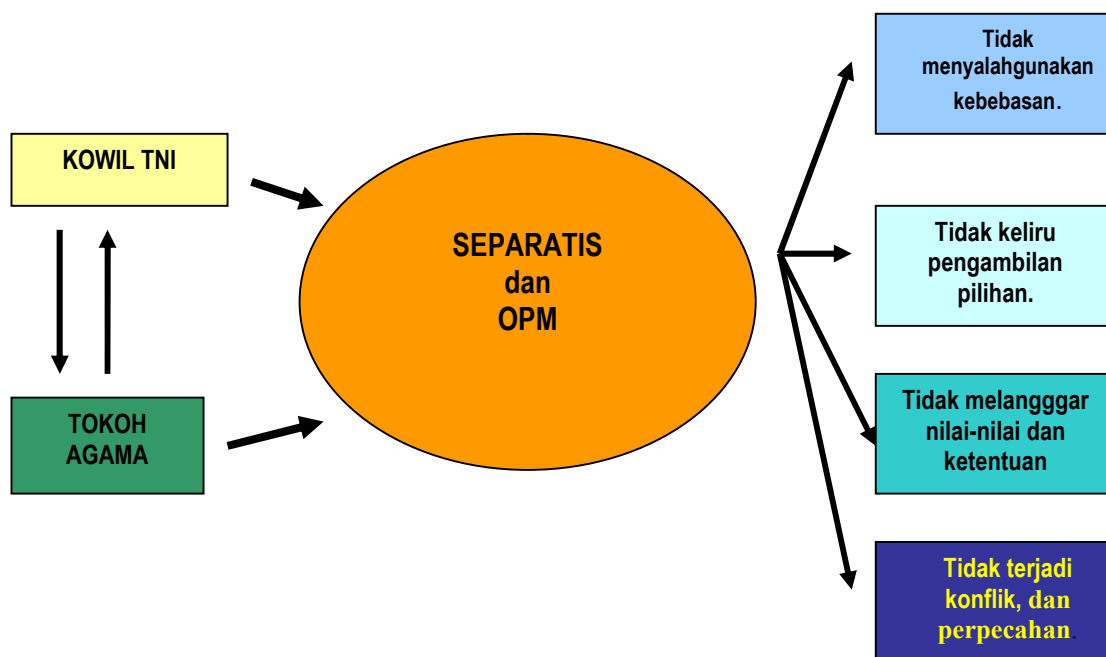
Terkait dengan keberadaan tokoh-tokoh agama yang ada di komando kewilayahan TNI, diharapkan dapat mengakomodir berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat atau antar golongan. Sebuah negara dengan berbagai kelompok agama mempunyai kerawanan atau sumber konflik terbesar apabila tidak diatasi sejak dini. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tokoh-tokoh agama dalam birokrasi pemerintahan dapat ditempatkan pada jabatan yang berhubungan dengan masalah pengendalian sosial.

Peranan tokoh agama mutlak perlu untuk menuntun dan memotivasi segenap warga pengikut gerakan separatis maupun masyarakat agar :

- (i) Tidak keliru atau salah dalam pertimbangan dan pengambilan pilihan,

- (ii) Tidak menyalahgunakan kebebasan,
- (iii) Tidak melanggar nilai-nilai dan ketentuan yang berlaku, tetapi menghormati dan mematuhi, dan
- (iv) Tidak terjadi konflik, kekerasan dan perpecahan.

Secara sistematis pola hubungan antara komado kewilayahan TNI bersama tokoh agama dapat digambarkan pada skema / Gambar 4.2.2.2 A



Gambar 4.2.2.2 A  
Skema usaha preventif Kowil TNI & Tokoh Agama terhadap keberadaan OPM

Peran tokoh agama dalam masyarakat memiliki berbagai fungsi pada kehidupan masyarakat antara lain :

- (a) Fungsi Edukatif : agama bertugas mengajar dan membimbing masyarakat. Agama menyampaikan ajaran-ajaran melalui upacara keagamaan, dakwah dan kotbah, meditasi, pendalaman rohani dll.

(b) Fungsi Penyelamatan. Agama memberikan anjuran dan perintah untuk selalu berbuat kebaikan agar manusia dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan.

(c) Fungsi Pengawasan Sosial. Agama menyeleksi kaidah-kaidah susila yang ada. Kaidah yang baik dikukuhkan sebagai norma dan kaidah yang buruk sebagai larangan atau tabu. Fungsi pengawasan diperkuat dengan adanya sanksi bagi manusia yang melanggar kaidah tersebut.

(d) Memupuk persaudaraan. Setiap agama menganjurkan agar umat manusia saling mencintai dan menghindari permusuhan. Dengan adanya rasa saling memupuk persaudaraan, cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud.

Tidak kalah penting, ada juga fungsi lain yang dapat dimainkan tokoh agama sebagai pemelihara solidaritas sosial baik intern maupun ekstern. Solidaritas intern adalah persatuan di antara sesama umat agama, sedangkan Solidaritas ekstern adalah persatuan antar umat beragama yang berbeda. Solidaritas dapat dipupuk melalui penanaman sikap saling mencintai sesama manusia, sikap saling toleransi dan menghormati. Tokoh agama mampu menenteramkan batin manusia, sehingga masyarakat dapat berpikir secara jernih dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Penulis menilai bahwa peran strategis dan tokoh agama dalam mengantisipasi kekuatan dan kelemahan dengan menciptakan *community empowerment* melalui pemberdayaan dan pendayagunaan potensi masyarakat.

Berbagai kekuatan dan kelemahan dalam memerangi Gerakan OPM yang tertuang dalam tabel 4.2.2.2 B

Tabel 4.2.2.2 B  
Faktor Kekuatan dan Kelemahan dan Upaya Preventif Gerakan OPM.

<b>FAKTOR INTERNAL</b>	
<i>KEKUATAN.</i>	<i>KELEMAHAN.</i>
a) Kowil TNI membangun kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat (tokoh agama dan tokoh masyarakat) dalam rangka membangun kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai yang ada pada Pancasila. b) Melakukan tindakan tegas terhadap separatis OPM yang nyata-nyata merongrong keutuhan NKRI. c) Memantapkan Kamdagri dengan cara meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah, (optimalisasi deteksi dini, giat patroli di wilayah rawan gangguan,	a) Fenomena melemahnya peran kepemimpinan pemimpin di daerah yang berseberangan dengan kepentingan nasional b) Situasi yang kurang menunjang kokohnya persatuan dan kesatuan akibat disharmonisnya antar tokoh di daerah, c) Pelaksanaan PILKADA dan proses pemekaran daerah seringkali menimbulkan konflik sosial baik secara horizontal maupun vertikal yang pada akhirnya instabilitas daerah
<b>FAKTOR EKSTERNAL</b>	
<i>PELUANG</i>	<i>KENDALA</i>
a) Adanya komitmen pemerintah daerah memelihara budi pekerti kemanusiaan dan moral yang luhur dalam seluruh aspek kehidupan nasional. b) Kehidupan kemasyarakatan berdasarkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. c) Dukungan Kodam XVII terhadap keberhasilan fungsi Kowil TNI untuk menjaga keutuhan NKRI.	a. Penanganan separatis bersenjata yang bergerilya di sejumlah daerah perbatasan, belum tertanggulangi, hal ini diakibatkan faktor geografi yang menyulitkan mobilisasi aparat yang terkait, b. Pemberdayaan Community empowerment belum optimal. c. Fanatisme berlebihan dapat menimbulkan perpecahan dan memicu timbulnya konflik destruktif, menyebabkan lunturnya nilai-nilai kebersamaan dan rasa sosial.

Dalam rangka menyikapi berbagai realita hubungan tokoh agama dan masyarakat, maka dapat dikembangkan berbagai strategi pencegahan terhadap berkembangnya keinginan kaum separatis yang ingin melepaskan diri dari

pangkuan NKRI. Karena itu fungsi intelijen di dalam mendeteksi berbagai bentuk potensi kerawanan sosial, termasuk manuver pihak ke tiga yang secara sengaja berupaya untuk memelihara konflik/ kekacauan sosial harus dikembangkan dengan kerjasama pihak terkait seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat.

#### **4.2.2.3. Strategi Tokoh Agama Kristen/Katholik Mencegah Isu Separatis Papua.**

Sikap gereja<sup>40</sup> seperti yang disampaikan oleh Romo Agus Ulahaiyan, Pr terhadap permasalahan konflik di Maluku, menurut pandangan penulis masih relevan apabila digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan konflik di Papua. Dikatakan ada empat tahap dalam penanganan konflik yaitu : Penghentian konflik; Perdamaian atau rekonsiliasi; Pemulihan atau “recovery”; dan Pelestarian kerukunan dan pencegahan konflik.

Langkah-langkah dan tindakan pencegahan konflik yang dikembangkan oleh gereja adalah antara lain meliputi : Pengkajian, terutama oleh pelaku perdamaian (pemuka agama) dengan melibatkan pelbagai pihak terkait (pemerintah, aparat hukum dan keamanan, pencinta damai, masyarakat umum, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam konflik); Pendekatan, personal maupun fungsional (otoritas/wibawa pimpinan dan lembaga), persuasive maupun repressive (keamanan dan hukum), dialogis (komunikatif, informatif dan transparan), transformative; Pertemuan, untuk penyelesaian masalah secara dialogis; Penyelarasan, dengan mengutamakan kesamaan; Penyatuan, dengan tetap menghargai dan menjamin perbedaan/kekhasan; Pemulihan keadaan dan Pembaharuan untuk hidup bersama yang lebih baik.

Demikian pula ada beberapa upaya pencegahan dan solusi konflik : Pembinaan terpisah maupun terpadu secara berkelanjutan; Mengembangkan informasi dan komunikasi yang baik dan berdaya-guna secara intens dan berkelanjutan, secara personal maupun fungsional; Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan sejati sebagai penjabaran serentak landasan dan penopang bagi nilai-nilai keagamaan

---

<sup>40</sup>. <http://stpakambon.wordpress.com/peran-tokoh-agama-dalam-mengantisipasi-dan-penanganan-konflik-di-maluku/>, diakses tanggal 20 Juli 2010, jam 21.39

dan keimanan; Mengembangkan “budaya dialog persaudaraan yang sejati”; Membangun hidup bersama yang “sehat”; Membangun keterbukaan, kejujuran dan kepercayaan yang tulus dan kokoh; Mengembangkan kerja sama yang baik (meluas dan berimbang); dan Mengatasi potensi konflik : menyelesaikan masalah sosial / antar kelompok; menggalang kesadaran dan penegakan hukum, HAM, keadilan dan kebenaran; dan menggalang penuntasan kebodohan, kemiskinan dan pengangguran serta aneka “penyakit social”.

Sikap ini tentunya sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah dalam rangka mencegah dan menanggulangi gerakan separatis. Seperti yang terkandung dalam Program Kegiatan Pokok RKP 2006 bahwa salah satunya adalah Pembinaan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai fasilitator dalam membangun kepekaan masyarakat terhadap setiap upaya provokasi terutama menggunakan 5K, politisasi agama, politisasi hubungan pusat dan daerah sebagai alat pembenar berkembangnya separatis

\*\*\*

Dari pembahasan dalam bab ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa pengaruh internal maupun eksternal, yang dapat mendorong munculnya gerakan separatis di wilayah Papua. Penyelesaian konflik yang sampai saat ini masih belum menemukan bentuk solusi, menjadi skala prioritas agenda pemerintah Indonesia dalam upaya menjaga stabilitas keamanan wilayah. Beberapa aspek dan dimensi, ternyata berpengaruh terhadap eksistensi perjuangan separatis Papua untuk melepaskan diri dari NKRI dan berupaya membentuk negara baru dengan cara melakukan berbagai kegiatan merongrong wibawa Pemerintah Indonesia. Adanya campur tangan asing dalam konflik internal di Papua, mendorong permasalahan Papua tidak bisa dianggap ringan, karena diduga ada kepentingan lain dibalik konflik internal di Papua.

Penghayatan kehidupan sebagai separatis cukup kental mewarnai generasi pemuda Papua, hal ini berdampak terhadap solidaritas sempit gerombolan separatis untuk mengingkari kedaulatan NKRI. Sebagai bangsa Indonesia yang merdeka dan cinta damai, hal tersebut tidak bisa dibiarkan secara terus menerus hingga menjadi bola salju yang suatu saat akan menjadi ancaman besar. Pemerintah Indonesia memberi ruang kepada para tokoh agama untuk ikut andil dalam mensiasati permasalahan separatis di Papua. Pendekatan secara persuasif terhadap masyarakat melalui metode "keimanan", diharapkan akan mampu merubah mental generasi muda Papua untuk terus berkarya dan membela Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 KESIMPULAN

Dari berbagai hasil temuan data lapangan dan uraian pembahasan di halaman depan, maka beberapa kesimpulan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Otonomi Khusus Propinsi Papua yang diatur dalam UU No. 21 tahun 2001 memberikan kewenangan kepada Propinsi untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hal-hak dasar masyarakat Papua. Sebagian besar responden (88%) menyatakan setuju bahwa implementasi Otsus Papua belum mencapai sasaran meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
- 2) Nama Organisasi Papua Merdeka atau OPM adalah nama yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada setiap organisasi atau faksi baik di Irian Jaya maupun diluar negeri yang dipimpin oleh putra-putra Irian Jaya pro-Papua Barat dengan tujuan untuk memisahkan atau memerdekakan Irian Jaya (West Papua) lepas dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Eskalasi gangguan OPM secara terus menerus menunjukkan peningkatan dalam mengganggu stabilitas keamanan dan keutuhan NKRI. Bentuk gangguan secara politis dilakukan baik di dalam negeri dan di luar negeri. Aktivitas separatis yang terbesar dilakukan dalam bentuk rapat gelap (30%) dan kegiatan provokasi
- 3) Dalam pembinaan massa pengikutnya, OPM selalu memberikan pengarahan yang berkaitan dengan agama, adat istiadat/gerakan Cargo adat dan melarang tindakan Radikal dalam mencapai tujuan kemerdekaan Papua. Berkembangnya embrio separatisme tidak terlepas dari doktrin-doktrin ideologi yang mendasari perjuangan mereka. Sejumlah 72% responden setuju bahwa penyelesaian dan pencegahan terhadap berkembangnya gerakan separatis Papua dilakukan dengan cara-cara dialogis.

- 4) TNI memandang bahwa upaya mempertahankan kedaulatan dapat dilakukan, baik secara berdiri sendiri maupun bersama-sama dengan unsur masyarakat termasuk dari tokoh agama dalam membantu menyiapkan kekuatan pertahanan. Keagamaan merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di Papua, karena itu tokoh agama memiliki peran strategis sebagai agen perubahan (*agent of change*).
- 5) Peranan tokoh agama selaku pemimpin gerejani, mutlak diperlukan untuk menuntun dan memotivasi segenap warga pengikut gerakan separatis maupun masyarakat agar : Tidak keliru atau salah dalam pertimbangan dan pengambilan pilihan, Tidak menyalahgunakan kebebasan, Tidak melanggar nilai-nilai dan ketentuan yang berlaku, tetapi menghormati dan mematuhi, dan tidak terjadi konflik, kekerasan dan perpecahan

## 5.2 REKOMENDASI

Dari beberapa uraian dan kesimpulan di atas, dapat disampaikan beberapa saran kebijakan sebagai berikut :

- 1) Pemerintah secara simultan terus mengintensifkan program penuntasan akar masalah munculnya konflik sosial, antara lain : Mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempermudah mendapatkan akses pendidikan serta pelayanan kesehatan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik, adil dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat Papua, menyiapkan SDM, menyiapkan lapangan kerja, ekonomi yang didasarkan pada ekonomi kerakyatan guna meningkatkan ekonomi masyarakat.
- 2) Tugas memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukung, merupakan bagian integral dalam membantu pemerintah untuk mengeliminasi pengaruh lingkungan gerakan OPM baik yang berasal dalam negeri ataupun sumber-sumber luar negeri. Operasi dengan menggunakan pendekatan pertahanan semesta, dilakukan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa keterlibatan seluruh komponen

kekuatan akan sangat menentukan dalam menghalau dan menanggulangi gerakan separatisme.

- 3) Kebijakan penyelesaian gerakan separatis menggunakan pendekatan humanisme yang menyangkut seluruh kehidupan masyarakat hendaknya ditangani secara tuntas, menyeluruh, terintegrasi dan terpadu dengan melibatkan seluruh instansi/institusi serta masyarakat.
- 4) Mengajak Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat ikut berperan serta dalam merumuskan kebijakan untuk menanggulangi/menangani konflik yang terjadi.
- 5) Aparat keamanan baik dari Polisi dan dari TNI dalam melaksanakan tugas dan menerapkan aturan/prosedur penanganan yang berlaku meliputi penanganan secara preemtif, preventif, represif, sesuai skala konflik yang terjadi.
- 6) Membentuk desa siaga sebagai desa percontohan dalam upaya mengambil hati rakyat secara langsung yang kemungkinan besar akan diterima oleh kalangan masyarakat lokal. Desa siaga dapat dijadikan sebagai basis pengembangan dialogis secara langsung kepada masyarakat lokal.
- 7) Dari aspek keamanan, Pemerintah tetap mengedepankan unsur pencegahan dengan melakukan filterisasi (security clearance) terhadap personel ekspatriat masuk ke wilayah NKRI.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Referensi

- Departemen Pertahanan, Buku Putih Pertahanan 2008.
- Departemen Pertahanan (2003), “Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21”, Jakarta
- Departemen Pertahanan, (2006), Ketahanan Wilayah Papua, Direktorat Analisa Lingkungan Strtegis, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Jakarta, 19 Desember 2006.
- Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1999, kumpulan dokumen Ajaran Social Gereja tahun 1891-1991.
- Francis, Diana (2006), Teori Dasar Transformasi Konflik social.
- Huntington, Samuel P, Benturan antar peradaban, Penerbit Qalam.
- Kamus Istilah Hankam Jilid I, disadur oleh Zamzani, Karlis.
- Kardi, Koesnadi, (2009), *Organizational Culture and Leadership* , Materi Kuliah SL-07 Universitas Pertahanan
- Kaho, Josef Riwu, (1988), *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Kountur,D.M.S (2007), *Metode Penelitian*,Jakarta : Percetakan Buana Printing
- Mar’at, (1983) *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moleong Lexy (2002), *Metode Penelitian Kualitatif*, : PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Miall, Hugh, Oliver Ramsbotham,and Tom Wodhouse, (1999) *Contemporary Conflict Resolution*, Cambridge: Polity.
- Nawawi, Hadari, (1987), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universtitas Gajah Mada Press, Yogyakarta.
- Nazir, Muhammad, (1998) , *Metode Peneltian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

- Prabowo, J Suryo, 2009, Pokok2 Pemikiran tentang Perang Semesta.
- Prabowo JS, Kepemimpinan Strategis, 2009.
- Robert Greene, 2007, ”33 Strategi Perang”.
- Sejarah berdirinya OPM, Kodam XVII Cendrawasih.
- Sairin, Mth, Weinata, 2002, Pesan-Pesan Kenabian di Pusaran Zaman.
- Soewarso (1982), *Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Keamanan Nasional*, Jakarta : Doktrin Dasar Wawasan Nusantara dan Doktrin Perjuangan Ketahanan Nasional
- Soemardjan, Selo,(2002) Konflik-konflik sosial di Indonesia, *Analisis CSIS, Tahun XXXI/2002*.
- Suebu, Barnabas, (2007), Kami Menanam, Kami Menyiram, Tuhanlah yang Menumbuhkannya, Pemerintah Propinsi Papua, Jayapura.
- Surata, Agus, (2001), *Atasi Konflik Etnis*, Global Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Syamsudin, Amin, dkk, *Menguak Separtis di Papua*.
- Sunardi RM (1997), *Teori Ketahanan Nasional* , Jakarta : Himpunan Alumni Studi Ketahanan Nasional
- Surakhmad, Winarno (1998), *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar: Metode dan Teknik*, Penerbit Tarsito, Bandung
- Suryadinata, Ermaya, 2005, *Hukum Dasar Geo Politik dan Geo Strategi*.
- Taylor, John G, 1998, *Perang Tersembunyi, Sejarah Timor Timur yang terlupakan*.
- Wanggai, Felix V., (2009), *New deal for papua: Menata Kembali Papua dengan Hati*, Indonesia Press dan The Irian Institute, Jakarta.
- Widjoyo, Muridan S., dkk, (2008) , *Papua Road Map (Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*, Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI), Jakarta.
- WJS Purwodarminto (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia

## Artikel dan Jurnal

Aditjondro, George Junus, 2009, Sejarah OPM, Organisasi papua Merdeka dalam <http://tangisananag.blogspot.com/2009/05sejarah-opm-organisasi-papa-merdeka.html>, 8 Maret 2010.

Andawat, (2010) *Dialog Jakarta – Papua: Masih Penuh Kekhawatiran dan Kecurigaan (bagian pertama)*, dalam <http://papua.blogspot.com/2010/02/Dialog-Papua-Jakarta-Masih-Penuh-Kekhawatiran-dan-Kecurigaan.html>, 9 Juni 2010

Anari, John, <http://oppb.webs.com/sejarahopm.htm>, diakses tanggal 13 Desember 2009, jam 20.29

Bambang Widiyanto dan Iwan M <http://oppb.webs.com/sejarahopm.htm>, 13 Desember 2009

Conoras, Yusman, (2007), *Permasalahan Dalam Penerapan Implementasi Otsus Papua*, Buletin Elektronik, Simpul untuk Keadilan dan Demokrasi Edisi 30 Tahun III-2007 dalam <http://apakabar.ws/forums//viewtopic.php?f=1&t=39767>, diakses tanggal 1 Desember 2009.

Nusa Bhakti, Ikrar Reformasi dan Separatisme, <http://www.tempo.co.id/ang/min/03/22/kolom2.htm>, 9 Oktober 2009

*Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, 16 Agustus 2005* dalam <http://id.wikisource.org/wiki/>, diakses tgl 12 Pebruari 2010

<http://apakabar.ws/forums//viewtopic.php?f=1&t=39767>, diakses 1 Desember 2009.

<http://www.opensubscriber.com/message/ppiindia@yahoogroups.com/3833936.html>, diakses tanggal 25 Nopember 2009

<http://www.tandef.net/menjawab-tantangan-papua-dalam-bingkai-nkri-bagian-I>  
Pendjelasan Perstudjuan New York dari Tahun 1962 ke Tahun 1969,  
disadur oleh Agus Bhakti, Anggota Dewan Penasehat Harian TANDEF

<http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/07/tgl/24/time/173026/idnews/808907/idkanal/10>, 9 September 2009

<http://massofa.wordpress.com/2008/02/05/teori-kepemimpinan/>, 20 juni 2010

Ant,

[http://bintangpapua.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4534:lembaga-agama-mediiasi-dialog-papua-jakarta&catid=3:kab-jayapura&Itemid=88](http://bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4534:lembaga-agama-mediiasi-dialog-papua-jakarta&catid=3:kab-jayapura&Itemid=88), 23 Januari 2010

<http://www.tni.mil.id/news.php?q=dtl&id=1837>, diakses tgl 28 Desember 2009

<http://geociti.es/CapitolHill/Senate/4931/main4.htm>, diakses tanggal 8 Maret 2010, jam 21.57

<http://www.fisip.ui.ac.id/papua/images/oziodownload/septer%20manufandu.pdf>, diakses tanggal 10 Juli 2010

<http://stpakambon.wordpress.com/peran-tokoh-agama-dalam-mengantisipasi-dan-penanganan-konflik-di-maluku/>, diakses tanggal 10 Juli 2010, jam 22.09

[http://www.indonesia-ottawa.org/information/details.php?type=news\\_copy&id=2454](http://www.indonesia-ottawa.org/information/details.php?type=news_copy&id=2454), diakses tanggal 18 Juli 2010, jam 11.44

<http://stpakambon.wordpress.com/peran-tokoh-agama-dalam-mengantisipasi-dan-penanganan-konflik-di-maluku/>, diakses tanggal 20 Juli 2010, Jam 21.39